

SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN METODE RISK
GOVERNANCE EARNING CAPITAL (RGEC) PADA BANK UMUM
SYARIAH INDONESIA**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada
fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



OLEH :

YENI MELASARI

NPM: 175210266

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

ABSTRAK**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN METODE RISK GOVERNANCE EARNING CAPITAL (RGECE) PADA BANK UMUM SYARIAH INDONESIA**

Oleh:

Yeni Melasari

175210266

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui tingkat kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020. Pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan metode RGECE (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning dan Capital). Jenis dan sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder, dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi terhadap laporan keuangan dan laporan GCG pada Bank Umum Syariah Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan dari Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020 dalam kategori sehat. Hasil dari rasio NPF, ROA, dan GCG berada dalam kondisi sehat, untuk rasio FDR, ROE dan BOPO dalam kondisi kurang sehat, sedangkan rasio CAR dalam kategori sangat sehat.

Kata Kunci: Kinerja, Bank, RGECE

ABSTRACT**FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS USING RISK GOVERNANCE
EARNING CAPITAL (RGEC) METHOD AT INDONESIA SHARIA
COMMERCIAL BANK**

By:

Yeni Melasari

175210266

The purpose of this study is to determine the level of performance of Islamic commercial banks in Indonesia for the 2016-2020 period. In this study using descriptive analysis with the RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning and Capital) method. The technique of data collection used is the documentation technique of financial reports and GCG reports or governance of Islamic commercial banks in Indonesia. The results of this study indicate that the health level of Islamic commercial banks in Indonesia in 2016-2020 is in the healthy category. The results of the NPF, ROA and GCG ratios are in a healthy condition for the FDR, ROE and BOPO ratios in an unhealthy condition, while the CAR ratio is in the very healthy category.

Key Words: Performance, Bank, RGEC

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat diberikan kekuatan fisik dan pikiran sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) diperlukan suatu benruk karya ilmiah berupa skripsi. Pada kesempatan ini penulis membuat skripsi yang berjudul **“Analisis Kinerja Keuangan Dengan Metode Risk Governance Earning Capital (RGEC) Pada Bank Umum Syariah Indonesia”** adapun skripsi ini dianjurkan untuk dapat memenuhi syarat dalam mengikuti ujian comprehensive guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Skripsi ini terwujud bukan hanya kemampuan dari penulis miliki melainkan juga diperoleh dari pihak lain yang senantiasa memberikan saran, dukungan serta bantuannya kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr H. Syafrinaldi, SH., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Ibu Dr. Eva Sundari, SE., MM, CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
3. Bapak Abd. Razak Jer, SE., M.SI selaku ketua program studi Manajemen Fakultas Manajemen dan Bisnis Universitas Islam Riau.

4. Bapak Azmansyah, SE., M.Econ selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan waktu serta sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, petunjuk dan motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen serta karyawan/ti yang telah memberikan petunjuk ajar kepada penulis selama pendidikan pada Jurusan Manajemen Fakultas Manajemen dan Bisnis Universitas Islam Riau.
6. Otoritas Jasa Keuangan yang telah menyediakan data-data keuangan perusahaan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
7. Terima kasih kepada kedua orang tua saya, ayah Laur (Alm), ibu Suryati yang tak pernah berhenti mendoakan, memberikan semangat serta selalu memberikan dukungan. Serta kakak saya Epi Susi Susanti dan adik-adik saya Rahmat Taufik Akbar, Akbar Tanjung, Hendri Taufik Akbar, dan Wenny Sumarni yang memberikan saya semangat serta membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada calon suami saya bang Puji yang telah memberikan semangat nya sampai terselesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada uncu saya Dr Marlina yang telah membantu saya untuk dapat masuk kedalam Universitas Islam Riau.
10. Terima kasih kepada teman-teman saya yaitu Janice Wijaya dan Miranda Gultom serta teman-teman seangkatan yang telah memberikan semangat dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan, bantuan dan doa yang telah memberikan kepada penulis menjadi amal baik serta mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis mengharapkan kritik dan sarah dari pembaca jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Pekanbaru, 19 November 2021

Yeni Melasari



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TELAAH PUSTAKA	9
2.1 Perbankan	9
2.2 Bank Syariah	10
2.3 Beda Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	11
2.4 Akad-akad Bank Syariah.....	12
2.4.1 Rukun Jual Beli.....	13
2.4.2 Syarat Jual Beli.....	13
2.4.3 Akad-akad Bank Syariah.....	13
2.5 Kinerja Keuangan Bank	15
2.6 Pengukuran Kinerja Keuangan Bank Syariah.....	16
2.6.1 Metode CAMEL.....	16
2.6.2 Metode RGEC.....	16
2.6.3 Maqashid Indeks.....	24
2.7 Penelitian Terdahulu.....	25
2.8 Kerangka Pemikiran	28
2.9 Hipotesis	29

BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Lokasi / Objek Penelitian	30
3.2 Oprasional Variabel.....	30
3.3 Populasi dan Sampel	31
3.4 Jenis dan Sumber Data	32
3.4.1 Jenis data.....	32
3.4.2 Sumber Data	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6 Teknik Analisis Data	33
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	34
4.1 Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia.....	35
4.2 Visi dan Misi	35
4.3 Profil Bank Umum Syariah di Indonesia.....	36
4.3.1 Sejarah PT Bank Syariah Mandiri	36
4.3.2 Sejarah PT Bank Syariah Muamalat Indonesia	36
4.3.3 Sejarah PT Bank Syariah Mega Indonesia	37
4.3.4 Sejarah PT Bank Syariah BNI	38
4.3.5 Sejarah PT Bank Syariah BRI	39
4.3.6 Sejarah PT Bank Syariah Bukopin	40
4.3.7 Sejarah PT Bank Jabar dan Banten.....	41
4.3.8 Sejarah Bank Panin Syariah.....	42
4.3.9 Sejarah Bank Victoria Syariah.....	43
4.3.10 Sejarah PT BCA Syariah	44
4.3.11 Sejarah PT Bank Aceh.....	45
4.3.12 Sejarah Bank BTPN Syariah Tbk	47
4.3.13 Sejarah Bank Net Indonesia Syariah	48
4.3.14 Sejarah Bank NTB Syariah.....	49
BAB V HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	51
5.1 Hasil Penelitian.....	51
5.1.1 Analisis Faktor Profile Risk.....	51
5.1.2 Good Corporate Governance (GCG)	68

5.1.3 Analisis Earning.....	100
5.1.4 Penilaian Capital.....	122
5.2 Pembahasan	133
BAB VI PENUTUP	137
6.1 Kesimpulan.....	137
6.2 Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA	140
LAMPIRAN DATA PENELITIAN	143



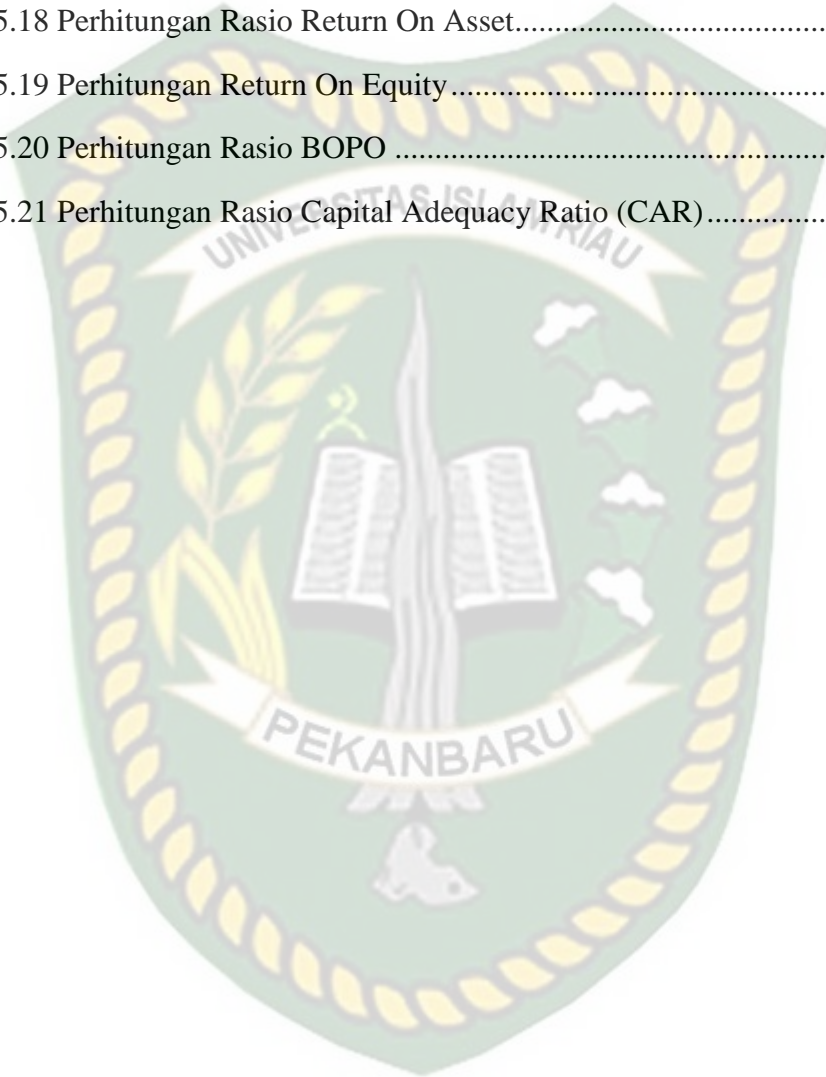
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rasio Umum Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2020	5
Tabel 2.1 Keriteria Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan RGEC.....	19
Tabel 2.2 Matriks Penetapan Peringkat Profil Risiko (NPF).....	21
Tabel 2.3 Matriks Penetapan Peringkat Profil Risiko (FDR)	22
Tabel 2.4 Matriks Peringkat Faktor GCG	22
Tabel 2.5 Keriteria Penetapan Peringkat ROA	23
Tabel 2.6 Keriteria Penetapan Peringkat ROE.....	24
Tabel 2.7 Keriteria Penetapan Peringkat BOPO	25
Tabel 2.8 Keriteria Penetapan Peringkat CAR	25
Tabel 2.9 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	32
Tabel 5.1 Perhitungan Rasio Non Performing Financing (NPF) 2016-2020.....	54
Tabel 5.2 Pehitungan Rasio Financing to Deposito Ratio (2016-2020)	62
Tabel 5.3 Good Corporate Governance (GCG) pada setiap Bank 2020	71
Tabel 5.4 Catatan Hasil Penilaian GCG PT Bank Syariah Mandiri	72
Tabel 5.5 Catatan Hasil Penilaian GCG PT Bank Syariah Muamalat Indonesia..	74
Tabel 5.6 Catatan Hasil Penilaian GCG PT Bank Syariah Mega Indonesia.....	76
Tabel 5.7 Catatan Hasil Penilaian GCG PT Bank Syariah BNI	78
Tabel 5.8 Catatan Hasil Penilaian GCG PT Bank Syariah BRI.....	80
Tabel 5.9 Catatan Hasil Penilaian GCG PT Bank Syariah Bukopin.....	83
Tabel 5.10 Catatan Hasil Penilaian GCG PT Bank Jabar dan Banten	85
Tabel 5.11 Catatan Hasil Penilaian GCG PT Bank Panin Syariah	87
Tabel 5.12 Catatan Hasil Penilaian GCG PT Bank Victoria Syariah	89
Tabel 5.13 Catatan Hasil Penilaian GCG PT BCA Syariah.....	91
Tabel 5.14 Catatan Hasil Penilaian GCG PT Bank Aceh	93

Tabel 5.15 Catatan Hasil Penilaian GCG PT Bank BTPN Syariah TBK	95
Tabel 5.16 Catatan Hasil Penilaian GCG PT Bank Net Indonesia Syariah	98
Tabel 5.17 Catatan Hasil Penilaian GCG PT Bank NTB Syariah	100
Tabel 5.18 Perhitungan Rasio Return On Asset.....	102
Tabel 5.19 Perhitungan Return On Equity	110
Tabel 5.20 Perhitungan Rasio BOPO	118
Tabel 5.21 Perhitungan Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR).....	125



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran30



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketahanan dan kesehatan perbankan dalam jangka panjang, menciptakan kestabilan sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan, juga untuk meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat mengingat peran bank sebagai salah satu lembaga kepercayaan. Akibat dari kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan semakin meningkat dan bderagam, maka peran dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh masyarakat baik yang berada di negara maju maupun negara berkembang. Sekarang perkembangan dunia perbankan semakin pesat dan juga modern, perbankan semakin mendominasi perkembangan ekonomi dan bisnis suatu negara. Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu Negara.

Pada saat ini dunia perbankan mengalami persaingan yang semakin ketat karena kondisi perekonomian yang semakin terbuka. Selain itu tentang dunia perbankan semakin sulit dengan diterapkannya Arsitektur Perbankan Indonesia (API). API merupakan kebijakan pemerintah terhadap dunia perbankan di Indonesia yang penerapannya yang telah dilaksanakan pada tahun 2010. Kebijakan API ini membahas tentang struktur perbankan yang sehat, pengawasan yang independen, dan perlindungan nasabah. Salah satu kebijakan API adalah

penetapan modal minimum untuk bank umum sebesar 100 miliar dan untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar 10 miliar.

Perbankan mempunyai peran yang sangat penting sebagai intermediasi kebutuhan modal kerja dan investasi disektor rill dengan pemilik dananya. Fungsi utama sektor dari perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan kedalam konteks bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi untuk menitipkan uang dengan aman dan menyediakan alat pembayaran jual beli barang atau jasa. Perkembangan perbankan syariah ditandai dengan disetujuinya. Perkembangan perbankan yang semakin baik menjadikan kompleksitas usaha dan profil risiko untuk dapat terus berkembang, dengan begitu seluruh bank memiliki kewajiban untuk memelihara atau untuk meningkatkan kesehatan bank dengan cara berpedoman serta mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dan dapat mengelola manajemen risiko dengan baik dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank juga perlu menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan yang mungkin akan timbul daro operasional bank sehingga diwajibkan melakukan self assessment (penilaian sendiri) yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2010 pasal 3 tentang kewajiban bank untuk melaksanakan self assessment dalam menjaga kesehatan bank.

Dalam mencapai tujuan nya, ajaran Islam memberikan panduan untuk menegakan asas keadilan dan menghapus eksploitasi dalam transaksi bisnis. Asas

ini dilaksanakan dengan melarang semua bentuk peningkatan kekayaan secara tidak adil. Salah satu sumber penting peningkatan kekayaan yang tidak dapat diperoleh adalah menerima keuntungan moneter dalam sebuah transaksi bisnis tanpa memberikan suatu imbalan setimpal yang adil. Riba mewakili dalam system Islam, suatu sumber utama keuntungan yang tidak diperbolehkan. Riba secara literal berarti peningkatan dan penambahan. Secara teknis riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.

Salah satu unsur yang sangat diperhatikan oleh bank adalah tingkat kesehatannya. Kesehatan suatu bank adalah kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan bisa memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara yang sesuai peraturan yang berlaku (Fitriana, dkk, 2015). Menurut Sudirman (2013:107) menjaga kesehatan bank dapat menjaga stabilitas ekonomi, social dan politi. Bank yang sehat akan memberikan manfaat kepada semua pihak yang terliba, yaitu masyarakat yang menggunakan jasa bank tersebut, pengelola bank, pemilik bank, masyarakat umum, bank sentral dan pemerintah.

Agar suatu bank dapat menjalankan seluruh kegiatannya dengan baik, maka tindakan yang dapat dilakukan adalah perencanaan, pengoprasian, pengendalian, dan pengawasan. Proses aliran keuangan secara terus menerus dan mencatatnya dalam laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi. Pada dasarnya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah suatu alat penguji dari pekerjaan bagian pembukuan akan tetapi selanjutnya laporan keuangan tidak hanya sebagai alat penguji tetapi juga sebagai dasar untuk dapat

menentukan atau menilai posisi atau kondisi keuangan dari perusahaan tersebut. Dimana dengan hasil analisis keuangan pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajer, kreditur, dan investor dapat mengambil sesuatu.

Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari beberapa segi. Penilaian ini bertujuan untuk dapat menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat. Dalam melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan pemerintah melalui bank Indonesia. Bank-bank diharuskan membuat laporan baik yang bersifat rutin atau secara berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu periode tertentu. Maka dari itu laporan ini dipelajari dan dianalisis, sehingga dapat diketahui kondisi kesehatannya akan memudahkan bank itu sendiri untuk memperbaiki kesehatannya.

Dilihat dari perkembangan bank syariah di Indonesia pada tahun 2016-2020, jumlah bank syariah di Indonesia mengalami fluktuasi (naik turun). Pada 2016 berjumlah 200 yang terdiri dari 13 BUS, 21 UUS, dan 166 BPRS dan pada tahun 2017 berjumlah 201 yang terdiri dari 13 BUS, 21 UUS dan 167 BPRS dan pada tahun 2018 berjumlah 201 terdiri dari 14 BUS, 20 UUS dan 167 BPRS dan pada tahun 2019 berjumlah 203 yang terdiri dari 14 BUS, 20 UUS dan 169 BPRS dan pada tahun 2020 berjumlah 198 yang terdiri dari 14 BUS, 20 UUS, dan 164 Bank BPRS.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan rasio umum kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK_Statistik Perbankan Syariah, 2020 :

Tabel 1.1

Rasio umum kinerja keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2020

No	Nama Bank	ROA	ROE	NPF	FDR	CAR	BOPO
1	PT Bank Syariah Mandiri	1.73	15.71	2.57	74.16	17.41	81.26
2	PT Bank Syariah Muamalat Indonesia	0.03	0.29	5.69	73.80	12.48	98.83
3	PT Bank Syariah Mega Indonesia	0.95	4.92	2.27	83.73	19.28	92.81
4	PT Bank Syariah BNI	1.45	10.86	3.90	71.67	20.66	82.88
5	PT Bank Syariah BRI	0.90	4.87	7.10	91.01	23.73	89.93
6	PT Bank Syariah Bukopin	0.02	0.15	7.10	161.11	14.67	99.08
7	PT Bank Jabar dan Banten	0.44	3.63	3.96	100.67	16.04	95.22
8	PT Bank Panin Syariah	0.04	0.25	3.77	105.47	16.28	99.85
9	PT Bank Victoria Syariah	0.02	0.15	4.58	79.85	21.78	99.78
10	PT BCA Syariah	0.89	2.40	0.69	94.40	38.45	89.53
11	PT Bank Aceh	1.67	12.76	1.64	70.66	20.24	82.67
12	PT Bank BTPN Syariah TBK	13.58	29.77	1.43	94.69	42.44	64.85
13	PT Bank Net Indonesia Syariah	17.23	19.67	0.00	0.09	346.4	142.04
14	PT Bank NTB Syariah	1.84	9.27	1.45	70.31	32.65	80.04
Rata-rata		2.91	8.19	3.29	83.68	45.89	92.76

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2020

Dengan adanya laporan rasio umum kinerja keuangan bank umum syariah diatas dapat dijelaskan oleh peneliti bahwa rata-rata dari ROA pada Bank Umum Syariah dalam kriteria sangat sehat dengan nilai 2.91%, rasio ROE dalam kriteria cukup sehat dengan nilai rata-rata 8.19%, rasio NPF dalam kriteria sehat dengan rata-rata 3.29%, rasio FDR dalam kriteria sehat dengan rata-rata 83.68%, rasio CAR dalam kriteria sangat sehat dengan rata-rata 45.89%, dan untuk rasio BOPO pada bank umum syariah dalam kriteria tidak sehat dengan rata-rata 92.76%.

Dengan adanya analisis laporan keuangan dapat diketahui juga tingkat kinerja suatu bank, karena tingkat kinerja adalah salah satu alat pengontrol kelangsungan hidup. Dari laporan keuangan, maka akan kita ketahui tingkat kinerja suatu bank (sehat atau tidak sehat). Untuk mengetahui sehat atau tidak sehat nya dapat dianalisis melalui aspek yang dilakukan oleh Bank Indoesian, yaitu RGEC (Risk profile, good corporate gorvenance, earning, and capital). Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengambil judul “ **ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE RGEC PADA BANK UMUM SYARIAH INDONESIA**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah:

“Apakah kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dikatakan sehat dengan menggunakan metode RGEC?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia dikatakan sehat jika diukur dengan metode RGEC pada tahun 2016-2020.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Melatih ketajaman analisis dan meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan terhadap kondisi rill dilapangan yang terkait

dengan disiplinnya ilmu manajemen yakni tentang kesehatan Bank.

2. Bagi akademis

Dapat digunakan sebagai sumber informasi atau dapat digunakan sebagai data sekunder dan sebagai bahan pemikiran tentang peran dan fungsi manajemen keuangan, khususnya dalam salah satu fungsi yakni mengetahui kesehatan bank.

3. Bagi Bank Syariah

Dari hasil penelitian ini, dapat digunakan sebagai masukan pada pihak pimpinan bank syariah untuk mengevaluasi kinerja bank, khususnya yang berkaitan dengan tingkat kesehatan bank.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini nantinya terdiri dari beberapa bab antara lain sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah yang diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini mengemukakan tentang konsep-konsep teoritis yang mendukung pelaksanaan peneliti, hipotesis, serta variabel penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Didalam bab ini akan diuraikan tentang lokasi penelitian/objek penelitian, jenis dan sumber data penelitian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini akan dijelaskan sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan secara garis besar mengenai gambaran umum tentang Bank Umum Syariah di Indonesia.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup dimana akan dikemukakan kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Perbankan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki fungsi sebagai penyelenggara sistem pengeturan dan pengawasan yang terintegrasi pada sektor jasa keuangan yang dibagi atas sektor perbankan, pasar modal, dan industry keuangan non-bank. Perbankan menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip hati-hati. Fungsi utama dari perbankan adalah sebagai penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Perbankan juga sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dari sisi sektor keuangan.

Tingginya pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir belum bisa diimbangi dengan kualitas lingkungan hidup yang semakin memburuk, kesenjangan social yang semakin memburuk, dan perubahan iklim yang semakin tidak dapat diprediksi. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan yang dapat berwawasan social dan lingkungan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangan Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Hal ini sejalan dengan inisiatif global untuk melaksanakan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh Perserikatan Bangsa Bangsa

(PBB) bekerja sama dengan berbagai pemerintah, civil society dan pelaku ekonomi dari seluruh dunia (sumber: OJK)

2.2 Bank Syariah

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang melaksanakan berdasarkan hukum Islam (Syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram) hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, harus media atau hiburan yang tidak Islami.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 130.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Al-Imran : 130)

Dalam hal ini perbankan syariah hadir sebagai solusi transaksi keuangan yang berbasis syariah. Dasar perbankan syariah mengacu kepada ajaran agama Islam yang bersumber pada al-Quran, al-hadist/as-sinah dan ijtihad. Ajaran agama Islam yang bersumber pada wahyu illahi dan asunah mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia yang sekaligus memperoleh kehidupan yang baik di akhirat. Adapun ayat Al-Qur'an yang

menjelaskan tentang transaksi yang sesuai dengan ajaran Islam adalah sebagai berikut:

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29)

Hal ini berarti, bahwa dalam mengerjakan kehidupan didunia tidak dapat dilakukan dengan menghalalkan segala cara, tapi harus dilakukan melalui gerakan amal saleh. Bank syariah adalah bank yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam (UU No. 21/2008 Tentang Perbankan Syariah).

2.3 Beda Bank Syariah dan Bank Konvensional

Agar dapat dilakukan analisis perbandingan kinerja keuangan antara bank syariah dan bank konvensional, berikut ini akan dipaparkan mengenai perbedaan secara prinsip antara bank syariah dan bank konvensional, diantaranya adalah:

1. Akad dan aspek legalitas, dalam bank syariah akad yang dilaksanakan berimplikasi bagi yang bersangkutan sampai keakhirat, oleh karenanya akad yang dilakukan harus berdasarkan hukum Islam. Sedangkan bank syariah tidak mempertimbangkan aspek tersebut.

2. Lembaga penyelesaian sengketa, tidak sebagaimana bank konvensional yang menyelesaikan perkaranya dipengadilan negeri. Bank syariah menyelesaikan masalah kepada badan arbiterasi muamalah Indonesia (BAMUI).
3. Struktur organisasi, pada bank syariah terdapat dewan pengawas syariah yang ditempatkan oleh dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSNMUI). Ini pula yang membedakan dengan bank konvensional dimana bank konvensional tidak memiliki dewan syariah.
4. Bisnis dan usaha yang dibiayai, bank syariah menjalankan usahanya tetap mengacu pada perintah dan larangan dalam Islam. Karena itu usaha yang akan dibiayai mesti terhindar dari unsur haram, memberikan mudharat pada masyarakat, asusila, dan perjudian. Sementara disisi lain bank konvensional tidak melihat rambu-rambu syariah dala operasionalnya.

2.4 Akad-akad pada Perbankan Syariah

Makna akad secara umum adalah semua pernyataan, baik lisan, tulisan maupun isyarat yang menyebabkan seseorang berkewajiban melakukan sesuatu, kewajiban ini menimbulkan ikatan antara pelaku akad. Kegiatan utama pada bank Syariah adalah pendanaan dan pembiayaan kepada nasabah. Kegiatan darin transaksi (muamalah) yang lazim dilayani oleh perbankan syariah adalah berdasarkan kegiatan jual beli beserta turunannya. Dalam muamalah ini ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

2.4.1 Rukun Jual Beli

- a. Subjek transaksi ; yaitu penjualan dan pembelian
- b. Objek transaksi ; yaitu uang (sebagai alat tukar) dan barang atau jasa
- c. Shighat akad ; yaitu ucapan atau isyarat dari penjual dan pembeli yang menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan akad secara ridha.

2.4.2 Syarat Jual Beli

- a. Subjek harus pemilik atau wakilnya
- b. Subjek harus orang yang cakap dalam bertransaksi
- c. Objek harus halal manfaat
- d. Objek dapat memungkinkan untuk serah terima
- e. Jelas kriteria objek
- f. Jelas harganya
- g. Saling ridha

2.4.3 Akad-akad bank syariah

Jika rukun tidak ada, maka transaksi tidak akan terjadi. Jika syarat tidak terpenuhi transaksi bisa tetap terjadi hanya saja tidak sah. Dilihat dari situs OJK adapun akad-akad yang sering digunakan oleh bank syariah dalam membantu pembiayaan bagi nasabah antara lain sebagai berikut:

- a. **Wadiah** : akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberikan kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.
- b. **Mudharabah** : akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh

modal dan pihak kedua (amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad tersebut, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang sengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

- c. **Musyarakah** : akad kerja sama diantara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing.
- d. **Murabahah** : akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
- e. **Salam** : akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.
- f. **Istisna'** : akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni') dengan penjual atau pembuat (shani')
- g. **Ijarah** : akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
- h. **Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik** : akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau

jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi memindahkan kepemilikan barang.

- i. **Qardh** : akad pinjam dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

2.5 Kinerja Keuangan Bank

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari prestasi yang dicapai oleh suatu perusahaan dalam mengelolah sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Salah satu cara untuk dapat menilainya dengan melihat profitabilitas perusahaan bila profitabilitas perusahaan semakin tinggi maka dapat dikatakan perusahaan tersebut semakin efektif dan efisien dalam operasionalnya.

Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia melihat keputusan No. 740/KMK.00/1989 tanggal 28 Juni 1989 bahwa kinerja merupakan pencapaian yang telah dicapai dalam periode tertentu yang menunjukkan tingkat dari kesehatan perusahaan tertentu. Sehingga salah satu dari faktor dalam menilai kinerja keuangan adalah dengan melihat kesehatan bank tersebut. Sehingga dapat menarik masyarakat untuk semakin percaya dengan bank tersebut.

Macam-macam variabel yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan bank tersebut salah satunya dengan melihat laporan keuangan. Kemudian dapat dihitung dengan rasio-rasio yang mendukung dalam menilai kinerja keuangan bank tersebut. Tujuan akhir dari sebuah perusahaan adalah mencapai profit sehingga profit merupakan ukuran dari keseluruhan prestasi sebuah perusahaan.

Penilaian kinerja keuangan sangat lah penting bagi perusahaan karena akan menggambarkan kondisi bank tersebut dan melihat apakah operasi yang dijalani berjalan secara normal atau tidak dan mampu memenuhi kewajibannya.

2.6 Pengukuran Kinerja Keuangan Bank Syariah

2.6.1 Metode CAMEL

Pengukuran kinerja bank dalam literatur perbankan diukur dengan CAMEL dan dikembangkan dengan memasukan unsur resiko. Pengukuran kinerja perbankan dilakukan dengan menggunakan cara mengamati hasil yang dicapai oleh bank dengan standar yang telah ditentukan oleh bank Indonesia, atau hasil perhitungan rasio keuangan perbankan untuk mengukur kinerjanya antara lain : Likuiditas, Struktur keuangan, Profitabilitas, Aktiva Produktif, Spred, Resiko usaha dan Efisiensi. Dengan semakin canggih nya alat analisis kesehatan bank maka ditemukan alat analisis yang terbaru yaitu dengan metode RGEC.

2.6.2 Metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital (RGEC)

RGEC berdasarkan surat edaran BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 dan PBI No. 13/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum menggantikan PBI sebelumnya Nomor 6/10/PBI2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, penentuan tingkat kesehatan bank menggunakan empat faktor yaitu risk profile, governance, earning, dan capital yang biasanya disingkat RGEC.

Tabel 2.1

Kriteria Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC

Bobot	Peringkat komposit	Keterangan
86% - 100%	Peringkat komposit 1	Sangat sehat
71% - 85%	Peringkat komposit 2	Sehat
61% - 70%	Peringkat komposit 3	Cukup sehat
41% - 60%	Peringkat komposit 4	Kurang sehat
≤ 40%	Peringkat komposit 5	Tidak sehat

Sumber : Bank Indonesia

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia pasal 9 No.13/1/PBI/2011 peringkat setiap faktor yang ditetapkan peringkat komposit, sebagai berikut:

1. Peringkat komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat, sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
2. Peringkat komposit 2 (PK-2), mencerminkan kondisi bank secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
3. Peringkat komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi bank secara umum cukup sehat, sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
4. Peringkat komposit 4 (PK-4), mencerminkan secara umum kondisi bank tersebut kurang sehat, sehingga dinilai kurang mampu untuk menghadapi

pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

5. Peringkat komposit 5 (PK-5), mencerminkan secara umum kondisi bank tersebut tidak sehat, sehingga dinilai tidak mampu untuk menghadapi pengaruh negative yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Dalam menentukan penilaian tingkat kesehatan bank, sudah ditentukan oleh Bank Indonesia yang kini telah beralih tanggung jawab kepada OJK. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 dan SE No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko baik secara individual maupun secara konsolidasi. Tata cara penilaian ini lebih sering dikenal dengan metode RGEC yaitu singkatan dari Risk Profile (profil resiko), Good Corporate Governance (GCG), Earning (rentabilitas), dan Capital (permodalan). Adapun keterangan atau penjelasan dari komponen-komponen metode RGEC adalah sebagai berikut:

1. Risk Profile

Penilaian faktor profil resiko merupakan penilaian terhadap resiko inhem dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Penelitian ini hanya akan menggunakan dua penilaian risiko yaitu;

- a. Risiko pembiayaan adalah suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang diterima bank sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan atau

dijadwalkan. Semakin besar rasio NPF yang dimiliki oleh bank maka semakin banyak pembiayaan bermasalah yang terjadi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor intem dan ekstem. Resiko pembiayaan dihitung dengan menggunakan rasio Non Performing Financing (NPF).

$$NPF = \frac{\text{pembiayaan bermasalah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 2.2

Matriks penetapan peringkat profil risiko (NPF)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	$NPF \leq 2\%$
2	Sehat	2% - 5%
3	Cukup sehat	5% - 8%
4	Kurang sehat	8% - 12%
5	Tidak sehat	$NPF \geq 12\%$

Sumber : SE BI No. 13/24/DPNP 2020

- b. Risiko likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank tersebut dalam memenuhi kewajiban jangka pendek pada saat ditagih. Semakin tinggi rasio FDR memberikan indikasi rendahnya likuiditas bank, karena dana bank lebih banyak digunakan untuk memberi pembiayaan dari pada investasinya dalam bentuk kas. risiko likuiditas dihitung dengan menggunakan rasio Financing to Deposit Ratio (FDR).

$$FDR = \frac{\text{total pembiayaan}}{\text{total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Tabel 2.3

Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (FDR)

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	FDR \leq 75%	Sangat sehat
2	75% - 85%	Sehat
3	85% - 100%	Cukup sehat
4	100% - 120%	Kurang sehat
5	FDR \geq 120%	Tidak sehat

Sumber : SE BI No. 6/23/ DPNP 2004

2. Good Corporate Governance

GCG adalah suatu tata kelola bank syariah yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, profesional, dan kewajaran (Rianto:2013). Bank wajib melakukan self assessment atas pelaksanaan GCG minimal satu kali dalam setahun. Adapun kriteria peringkat GCG dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 2.4

Matriks peringkat faktor good corporate governance (GCG).

Peringkat	Nilai komposit	Keterangan
1	\leq 1.5	Sangat baik
2	1.5 – 2.5	Baik
3	2.5 – 3.5	Cukup baik
4	3.5 – 4.5	Kurang baik
5	4.5 – 5	Tidak baik

Sumber : Bank Indonesia

3. Earning (Rentabilitas)

Penilaian rentabilitas untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Penilaian kuantitatif faktor rentabilitas dilakukan dengan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

a. Return on assets (ROA)

ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi persentase berarti tingkat produktivitas akan semakin meningkat. Rasio ROA dapat dihitung sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{total asset}} \times 100\%$$

Tabel 2.5

Kriteria penetapan peringkat ROA

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	$ROA \geq 1.5\%$	Sangat sehat
2	1.25% - 1.5%	Sehat
3	0.5% - 1.25%	Cukup sehat
4	0% - 0.5%	Kurang sehat
5	$\leq 0\%$	Tidak sehat

Sumber : SE BI No. 13/24/DPNP 2020

b. Return On Equity (ROE)

ROE adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan bersih dikaitkan dengan pembayaran deviden. Semakin tinggi persentase ROE yang diperoleh maka semakin besar kenaikan laba bersih

yang diperoleh oleh bank tersebut, begitupula sebaliknya jika semakin rendah ROE maka semakin kecil laba bersih yang diterima oleh bank. Rasio ROE dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$ROE = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{modal sendiri}} \times 100\%$$

Tabel 2.6

Matriks kriteria penetapan peringkat ROE

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	ROE \geq 20%	Sangat sehat
2	12.5% - 20%	Sehat
3	5.01% - 12.5%	Cukup sehat
4	0% - 5%	Kurang sehat
5	ROE \leq 0%	Tidak sehat

Sumber : SE BI No. 13/24/DPNP 2020

c. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)

BOPO adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi. Semakin rendah persentase BOPO maka semakin efisien bank dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar dan sebaliknya semakin tinggi persentase BOPO maka menunjukkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional dan dapat menimbulkan kerugian terhadap bank . BOPO dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{beban operasional}}{\text{pendapatan operasional}} \times 100\%$$

Tabel 2.7

Matriks kriteria penetapan peringkat BOPO

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	$BOPO \leq 83\%$	Sangat sehat
2	83% - 85%	Sehat
3	85% - 87%	Cukup sehat
4	87% - 89%	Kurang sehat
5	$BOPO \geq 89\%$	Tidak sehat

Sumber : SE BI No. 13/24/DPNP 2020

4. Capital (permodalan)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank dan mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit atau pembiayaan yang diberikan. Semakin tinggi rasio CAR yang diperoleh oleh bank maka semakin bagus kualitas permodalan bank tersebut, dan begitupun sebaliknya. Berikut adalah cara perhitungan CAR dengan rumus sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{modal}}{\text{aktiva tertimbang menurut risiko}} \times 100\%$$

Tabel 2.8

Matriks kriteria penetapan peringkat CAR

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	$CAR \geq 12\%$	Sangat sehat

Peringkat	Kriteria	Keterangan
2	9% - 12%	Sehat
3	8% - 9%	Cukup sehat
4	6% - 8%	Kurang sehat
5	$CAR \leq 6\%$	Tidak sehat

Sumber : SE BI No. 13/24/DPNP 2020

2.6.3 Maqashid Indeks

Mohammed Dkk telah mengembangkan evaluasi kinerja untuk perbankan syariah berdasarkan maqashid indeks yang merujuk pada konsep maqashid syariah Abu Zahra. Maqashid indeks ini terbagi menjadi 3 variabel yaitu pendidikan individu (Tahdzid al-nafs), Mestablishing justice (Iqamah al-adl), dan Masalahah (Welfare). Kemudian dari 3 variabel tersebut ditransformasikan menjadi sepuluh rasio kinerja.

- a. Education The Individual (Pendidikan Individu), dimaksudkan bahwa bank syariah harus melakukan pengembangan pengetahuan dan keahlian pada individu sebagai nilai-nilai spiritual meningkat. Variabel ini terdiri dari 4 rasio yaitu Hibah, Pendidikan, Penelitian, Pelatihan dan Publitas.
- b. Justice (Keadilan), dimaksudkan bahwa bank syariah harus memastikan kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi dan aktifitasnya bisnis yang tercukupidalam produk, pricing, dan ketentuan-ketentuan kontrak. Variabel justice (keadilan) terbagi menjadi 3 rasio, yaitu Fair Return, Funcional Distribution, dan Interest Free Product.
- c. Masalahah (Kesejahteraan), dimaksudkan bahwa bank syariah harus mengembangkan proyek-proyek investasi dan jasa social untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Variabel ini terbagi menjadi tiga

rasio yaitu, Profit Return, Personal Income Transfer (Zakat), dan Investment In Real Sector.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.9

Penelitian Terdahulu

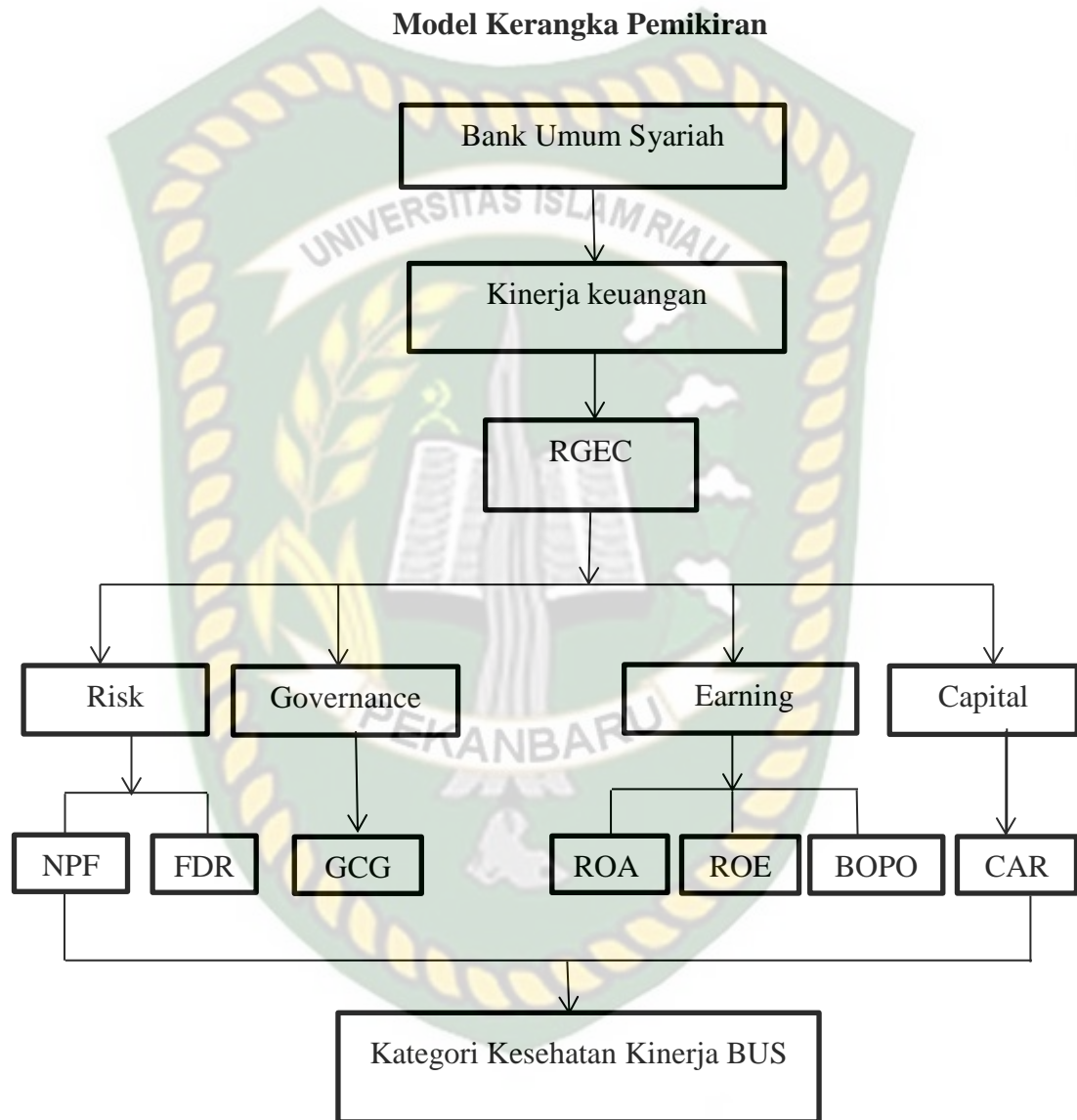
Nama dan Judul Penelitian	Variabel yang digunakan	Metode Analisis	Hasil kesimpulan
A.Khairuddin dan Achmad (2017) Analisis kinerja keuangan bank umum syariah dengan menggunakan metode RGEC.	Analisis yang digunakan NPF, FDR, ROA, dan CAR.	Metode RGEC	Dari sisi kecukupan modal sama-sama berapa pada tingkat 1. Dengan kata lain BUS telah memenuhi ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum.
Dina Islamiyati dan Mochammad Khoirul Anwar (2018) Analisis perbandingan kesehatan BCA Syariah dan BRI Syariah menggunakan metode RGEC	Analisis yang digunakan NPF, FDR, GCG, ROA, dan CAR	Metode RGEC	Selama tahun 2010-2017 dalam aspek risk profile pada indikator NPF BCA Syariah lebih unggul dibandingkan dengan BRI Syariah, sedangkan pada indikator FDR BRI Syariah lebih unggul dibandingkan dengan BCA

Nama dan Judul Penelitian	Variabel yang digunakan	Metode Analisis	Hasil kesimpulan
periode 2010-2017.			Syariah.
Jumriaty Jusman (2019) Analisis tingkat kesehatan Bank Umum Syariah berdasarkan metode RGEC pada PT Bank Muamalat Indonesia	Analisis yang digunakan NPF, FDR, GCG, ROA, ROE, BOPO, dan CAR	Metode RGEC	Berdasarkan pembahasan pada latar belakang, kajian pustaka, metode penelitian, dan hasil penelitian maka diambil kesimpulan bahwa penilaian tingkat kesehatan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk pada tahun 2015-2017 yang diukur dengan pendekatan RGEC secara keseluruhan dapat dikatakan kurang sehat, sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
Hadi Sumanto	Analisis yang	Metode	Sebagai salah satu

Nama dan Judul Penelitian	Variabel yang digunakan	Metode Analisis	Hasil kesimpulan
<p>dan Nurul Hidayah (2020) Analisis penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC pada PT Bank BRI Syariah (Persero) 2013-2018.</p>	<p>digunakan NPF, FDR, ROA, ROE, BOPO, dan CAR</p>	<p>RGEC</p>	<p>bank umum syariah di Indonesia, bank BRI Syariah Tbk. Harus tetap menjaga tingkat kesehatan bank pada tahun-tahun berikutnya agar dapat mempertahankan kepercayaan nasabah dan stake holder terhadap bank BRI Syariah Tbk.</p>
<p>Budianto (2020) Analisis tingkat kesehatan PT Bank Aceh Syariah dengan metode RGEC.</p>	<p>Analisis yang digunakan NPF, FDR, GCG, ROA, BOPO, dan CAR.</p>	<p>Metode RGEC</p>	<p>Berdasarkan rasio NPF selama tahun 2016-2018 menunjukkan risiko kredit Bank Aceh Syariah masih sangat baik karena memiliki rasio dibawah 2%. Sedangkan untuk FDR selama 2018 masih pada level yang baik.</p>

2.8 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1



2.9 Hipotesis

Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan yang akan diujikan kebenarannya dan digunakan sebagai pedoman untuk pengumpulan data. Adapun terdapat dalam penelitian ini adalah

“ Diduga kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia dengan metode RGEC dalam kategori sehat”



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi / Objek Penelitian

Lokasi dan objek pengambilan data dipenelitian ini adalah pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dan dapat diakses pada situs resmi OJK.

3.2 Operasional Variabel

Tabel 3.1

Operasional Variabel

No	Variabel	Devinisi Variabel	Indikator	Skala
1	Risk Profile	Resiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pada bank.	$NPF = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}}$ $FDR = \frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Dana pihak ketiga}}$	Rasio
2	GCG	Tata kelola perusahaan dengan baik dan benar dengan adanya suatu sistem yang mengatur hubungan antara dewan komisaris, dewan direksi, stakeholder dan pemegang saham perusahaan demi tercapainya tujuan suatu	Total Penilaian Self Assesment GCG	Ordinal

No	Variabel	Devinisi Variabel	Indikator	Skala
		perusahaan.		
3	Earning	Rasio ini digunakan untuk menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan asset oleh bank	$ROA = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{total asset}}$ $ROE = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{total ekuitas}}$ $BOPO = \frac{\text{beban operasional}}{\text{pendapatan operasional}}$	Rasio
4	Capital	Metode penilaian bank berdasarkan permodalan yang dimiliki bank dengan menggunakan rasio (CAR)	$CAR = \frac{\text{modal bank}}{ATMR}$	Rasio

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian (Kuncoro, 2009 : 118). Sample adalah suatu himpunan bagian dari unit populasi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan GCG pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia pada tahun 2016-2020. Berikut adalah daftar Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia:

1. PT Bank Syariah Mandiri.
2. PT Bank Syariah Muamalat Indonesia.
3. PT Bank Syariah Mega Indonesia.
4. PT Bank Syariah BNI.

5. PT Bank Syariah BRI.
6. PT Bank Syariah Bukopin.
7. PT Bank Jabar dan Banten.
8. PT Bank Panin Syariah.
9. PT Bank Victoria Syariah.
10. PT BCA Syariah.
11. PT Bank Aceh.
12. PT Bank BTPN Syariah TBK.
13. PT Bank Net Indonesia Syariah.
14. PT Bank NTB Syariah.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis data

adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif untuk mengukur analisis kinerja keuangan pada bank syariah.

Data ini akan didapatkan pada situs resmi masing-masing bank syariah di Indonesia. Selain itu data yang digunakan adalah laporan keuangan dan laporan GCG dari tahun 2016-2020.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data merupakan sumber objek dari mana data dapat diperoleh, data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan GCG tahunan. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak perantara seperti didapat dari situs resmi masing-masing bank.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Adapun teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan mengambil data laporan keuangan dan laporan GCG atau tata kelola bank umum syariah di Indonesia dari internet melalui situs www.ojk.co.id.

3.6 Teknik Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis metode RGEC. Penganalisisan ini diambil dari rincian laporan keuangan Bank Syariah yang meliputi laporan posisi keuangan dan laporan GCG, dari laporan ini nantinya akan dihitung dan dicari rasionya, lalu hasilnya akan dianalisis untuk kinerja keuangan bank syariah. Menghitung satu persatu sesuai rasio yang sudah ditentukan berupa NPF, FDR, GCG, ROA, dan CAR pada masing-masing bank syariah tersebut.

Menganalisis hasil perhitungan setelah dilakukan analisis hasil dari perhitungan dengan melihat ketentuan sebelumnya, sehingga dengan ini akan melihat kinerja keuangan antara bank yang satu dengan bank yang lainnya. Analisis data dari penelitian ini adalah Analisis Deskriptif. Penelitian ini menggunakan perhitungan statistik dengan analisis deskriptif pada penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang masing-masing rasio keuangan dari variabel input dan output pada Bank Umum Syariah periode 2016-2020. Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah menggunakan metode RGEC sebagai berikut:

1. Mengumpulkan laporan keuangan masing-masing bank.

2. Menyajikan rasio-rasio keuangan yang sesuai dengan metode RGEC.
3. Menentukan peringkat komponen RGEC.
4. Menetapkan peringkat komposit tingkat kesehatan masing-masing bank.



BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia

Bank syariah atau disebut dengan Islamic Bank yang merupakan pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian yang berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lainnya untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah.

Bank syariah pertama kalinya muncul pada tahun 1963 sebagai pilot project dalam bentuk bank tabungan pedesaan dikota kecil Mit Ghamr, Mesir. Percobaan ini terjadi di Pakistan pada tahun 1965 dalam bentuk bank koperasi. Setelah itu, gersksn bank syariah ini mulai hidup kembali pada pertengahan tahun 1970-an. Berdirinya Islamic Development Bank pada 20 Oktober 1975, yang merupakan lembaga keuangan internasional Islam multilateral, pada periode ini diawali dengan bermunculannya bank syariah diberbagai negara, seperti Dubai Islamic Bank di Dubai pada Maret 1975, Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sudan pada tahun 1977, dan Kuwait Finance House di Kuwait pada tahun 1977. Sampai saat ini sudah lebih dari 200 bank dan lembaga keuangan syariah yang beroperasi di 70 negara muslim dan nonmuslim yang total portofolionya sekitas \$200 milyar. Di Indonesia, bank syariah telah muncul semenjak awal 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia.

4.2 Visi dan Misi

Bank Syariah Indonesia (BSI)

Visi : Menjadi Top 10 di Global Islamic Bank

Misi : Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham dan menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

4.3 Profil Bank Umum Syariah di Indonesia

4.3.1 Sejarah PT Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri (BSM) berawal sejak tahun 1999. Mandiri syariah adalah lembaga perbankan. Pada awalnya bank ini berdiri pada tahun 1955 dengan nama Bank Industri Nasional. Pada tahun 1967 bank ini berubah menjadi Bank Maritim Indonesia, kemudian berubah kembali pada tahun 1973 menjadi Bank Susila Bakti. Setelah beberapa kali berganti nama dan terakhir kali menjadi Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 dan menjadi pemegang saham mayoritas Bank Susila Bakti. Pada tahun 2002 mendapat status bank devisa.

4.3.2 Sejarah PT Bank Syariah Muamalat Indonesia

PT Bank Syariah Muamalat Indonesia berdiri pada 1 November 1991, pendirian bank yang diprakarsai oleh beberapa tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa tokoh muslim yang bergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), serta pemerintahan ini mendapat dukungan dari tokoh dan pemimpin Muslim terkemuka, pengusaha Muslim serta masyarakat. Dalam bentuk dukungan masyarakat ini yaitu berupa komitmen pembelian saham.

Setelah dua tahun beroperasi, Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat sebagai Bank Devisa pada 27 Oktober 1994. Pengakuan ini semakin memperkuat posisinya sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Pada tahun 1998 merupakan tahun yang sangat berat sekali bagi dunia perbankan, karena mengalami krisis financial yang menghantam Indonesia dan berdampak luas bagi bisnis, termasuk sektor perbankan karena kondisi bisnis yang tidak kondusif.

Dengan usaha yang ekstra keras dan disiplin Bank Muamalat telah berhasil mengembalikan kerugian financial pasca krisis tahun 1998 menjadikan keuntungan yang signifikan bagi bank. Pasca krisis tahun 1998, Bank Muamalat mulai bangkit dari keterpurukan dan mengawali dengan pemangkatan direksi baru dari internal. Hasil kerja Bank Muamalat dari tahun 1998 hingga 2008 telah dibuktikan dengan meningkatnya total aktiva Bank Muamalat sebesar 25.3 kali lipat menjadi Rp 12.60 triliun, jumlah ekuitas bertambah 23.6 kali lipat menjadi Rp 966 milyar, dan pertumbuhan nasabah hingga menjadi 2.9 juta nasabah. Bank Muamalat menutup tahun krisis financial global pada tahun 2008 dengan peningkatan laba bersih 43% menjadi Rp 207 milyar, dimana laba sektor perbankan konvensional nasional secara agregat menurun sebesar 13%, dan laba agregat perbankan syariah menurun 20%.

4.3.3 Sejarah PT Bank Syariah Mega Indonesia

Pada awalnya dikenal sebagai PT Bank Umum Tugu, yaitu bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990. Pada 27 Juli 2004 kegiatan usaha

tersebut berubah yang semulanya bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) serta dilakukan perubahan logo untuk meningkatkan citranya dimata masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya.

Pada tanggal 25 Agustus 2004 BSMI resmi beroperasi. Pada 7 November 2007 pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan logo Bank Syariah Mega Indonesia sehingga lebih menunjukkan identitasnya sebagai bagian dari grup Mega Corpora. Pada tahun 2013 untuk semakin memperkokoh posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank syariah terdepan di Indonesia, maka bank melakukan relokasi kantor pusat dari Menara Bank Mega ke Menara Mega Syariah.

Sejak tahun 2018 Bank Mega Syariah telah ditunjuk sebagai bank penerimaan, bank penetapan dan mitra investasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pada tahun 2019 BPKH mempercayai Bank Mega Syariah untuk menjadi salah satu bank likuiditas yang menjadi partner BPKH selaku penanggung jawab pengelolaan dana haji di Indonesia.

4.3.4 Sejarah PT Bank Syariah BNI

Pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 cabang kantor yang ada di Indonesia yaitu di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu.

Disamping ini nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di kantor cabang BNI konvensional (office channeling) lebih kurang sebanyak 1500 outlet yang tersebar diseluruh penjuru Indonesia.

Didalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 telah ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009, dan rencana tersebut terlaksanakan pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

4.3.5 Sejarah PT Bank Syariah BRI

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui surat edaran No16/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal, 17 November 2008 PT Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi PT Bank BRI Syariah berubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah islam.

Dengan adanya PT Bank BR Syariah ditengah-tengah industry perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntunan masyarakat terhadap

sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern.

PT BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan asset PT BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi asset, jumlah pembiayaan dan memperoleh dana pihak ketiga. Fokus pada segmen menengah bawah, PT BRI Syariah menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan pelayanan perbankan.

4.3.6 Sejarah PT Bank Syariah Bukopin

PT Bank Syariah Bukopin sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorium PT Bank Bukopin Tbk, diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia sebuah bank konvensional oleh PT Bank Bukopin Tbk, proses dari akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 sampai 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional yang berada di Samarinda Kalimantan Timur.

Pada tahun 2001 hingga akhir 2002 proses akuisisi oleh organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Persyarikatan Indonesia yang mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Dalam perkembangannya PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan akuisisi oleh PT Bank Bukopin Tbk, maka pada tahun 2008 telah mendapatkan izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008

tentang pemberian izin perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah dan perubahan nama PT Bank Persyarikatan Indonesia menjadi PT Bank Syariah Bukopin, dimana secara resmi mulai efektif beroperasi pada tanggal 9 Desember 2008, dan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla selaku wakil presiden Republik Indonesia.

4.3.7 Sejarah PT Bank Jabar dan Banten

Pendirian bank BJB syariah diawali dengan pembentukan divisi atau unit usaha syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Pada tanggal 20 Mei 2000 dengan adanya tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat ini. Setelah 10 tahun berlalu operasional divisi atau unit usaha syariah, manajemen PT Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, memiliki pandangan untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah, maka dengan adanya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Diputuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Sesuai hasil keputusan rapat maka pada tanggal 15 Januari 2000 berdirinya Bank BJB Syariah berdasarkan Akta Pendirian No. 4 yang dibuat oleh notaris Fathiah Helmi dan telah mendapatkan pengesahan dari

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU.04317.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010.

Saat berdirinya Bank BJB Syariah modal awal disetor sebesar Rp. 500.000.000.000. Pada tanggal 6 Mei 2010 setelah mendapatkan izin Bank BJB Syariah memulai usahanya, dengan terlebih dahulu dilaksanakan cut off dari Divisi/Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang menjadi cikal bakal Bank BJB Syariah. Kemudian pada tanggal 21 Juni 2011 tentang penambahan modal, maka PT Banten Global Developmet menambahkan modal sebesar Rp.7.000.000.000.

Hingga saat ini Bank BJB Syariah memiliki kantor pusat di Bandung Jalan Braga No 135, dan telah memiliki 8 kantor cabang, 44 kantor cabang pembantu, 54 jaringang ATM yang tersebar di daerah propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dan 49.630 jaringan ATM bersama. Pada tahun 2021 harapan Bank BJB Syariah dapat semakin memperluas jangkauan pelayanan yang tersebar didaerah Priponsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.

4.3.8 Sejarah Bank Panin Syariah

Bank Panin Syariah merupakan salah satu lembaga perbankan terbesar syariah yang berpusat di Jakarta. Panin syariah merupakan salah satu anak perusahaan Bank Panin, bank umum yang menjadi peringkat keenam terbesar di Indonesia yang telah beroperasi selama lebih dari

empat dasa warsa. Dulunya bank ini bernama Bank Harfa yang berpusat di Surabaya yang berdiri sejak 1990.

PT Bank Panin Syariah berdiri dengan melaksanakan kegiatan usaha dengan adanya prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009. Kemudian resmi beroperasi sebagai bank umum syariah pada pada 2 Desember 2009. Pada tahun 2021 Bank Panin Syariah memiliki 12 kantor cabang.

4.3.9 Sejarah Bank Victoria Syariah

PT Bank Victoria Syariah pertama kalinya berdiri dengan nama PT Bank Swaguna, berdasarkan Akta No 9 tahun 15 April 1966. Selanjutnya PT Bank Swaguna diubah menjadi PT Bank Victoria Syariah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Erni Rohainin SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan.

Perubahan dari kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010, adapun kepemilikan saham Bank Victoria pada Bank Victoria Syariah adalah sebesar 99.99%.

Pada tahun 2011-2012 Bank Victoria Syariah menambah jumlah jaringan kantor dan memperluas pangsa pasar, tahun 2013 Bank Victoria

Syariah memperkokoh fondasi melalui pengembangan produk dan segmen bisnis baru. Pada tahun 2014-2017 Bank Victoria Syariah mendapat penambahan sektor modal hingga mencapai 310 Milyar, untuk tahun 2015 Bank Victoria Syariah dapat penataan strategi dan penguatan GCG, tahun 2018 dapat memperbaiki kualitas asset produktif dan profitabilitas. Dengan mendapatkan dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Victoria Internasional Tbk telah dapat membantu tumbuh kembangnya Bank Victoria Syariah yang terus menerus dapat berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.

4.3.10 Sejarah PT BCA Syariah

PT Bank BCA Syariah merupakan hasil dari konversi dari akuisis PT Bank Central Asia Tbk (BCA) pada tahun 2009 terhadap PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) berdasarkan Akta Akuisis No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat oleh notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.SI., Notaris di Jakarta. Pada awalnya Bann UIB merupakan bank yang kegiatan usahanya sebagai bank umum konvensional, kemudian mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang menjalankan dengan kegiatan syariah. Oleh karena itu Bank UIB mengubah menjadi BCA Syariah dan menyesuaikan seluruh ketentuan dalam anggaran dasar menjadi sesuai dengan bank yang menjalankan prinsip syariah.

Berdasarkan Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010, BCA Syariah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum syariah .

4.3.11 Sejarah PT Bank Aceh

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh atas prakarsa Dewan Pemeritah Daerah Peralihan Provinsi Aceh. Dengan surat keputusan nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Penghutan Tamboenan, wakil notaris di Kutaraja untyuk memdirikan suatu bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” Dengan modal dasar sebesar Rp 25.000.000.

Untuk memenuhi kebutuhan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud dari pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Pada tanggal 7 April 1973 Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Pada tanggal 6 Agustus 1973 secara resmi dianggap sebagai hari lahirnya Bank

Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Perubahan pada bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman,SH No 55 tanggal 21 April 1999 yang pada awalnya bernama Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan surat keputusan No. C-8260 HT.01.01.TH.99 pada tanggal 6 Mei 1999. Dalam akte pendirian perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 Milyar.

Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar ditingkatkan lagi menjadi Rp 1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Bank ini juga memiliki aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya suran Bank Indonesia No.6/4Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial bank. Tanggal 25 Mai 2015 bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses

konversi dimulai dengan tim konversi bank Aceh dengan diawasi oleh OJK. Setelah melalui berbagai tahap dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisioner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal. Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 kantor pusat, 1 kantor pusat operasional, 25 kantor cabang, 86 kantor cabang pembantu, 20 kantor kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (2 kantor cabang, 2 kantor cabang pembantu dan 1 kantor kas) dan 17 Payment Point. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.

4.3.12 Sejarah Bank BTPN Syariah Tbk

BTPN Syariah merupakan anak perusahaan BTPN, dengan kepemilikan saham 70% dan merupakan bank syariah yang ke-12 di Indonesia. Bank tersebut beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan pada masyarakat terpinggirkan yang belum terjangkau serta segmen masyarakat prasejahtera. Visi, misi

dan nilai BTPN Syariah mencerminkan arah usahanya agar tujuannya terpenuhi. BTPN Syariah dibentuk dari konversi PT Bank Sahabat Purba Danarta (Bank Sahabat) yang berpusat di Semarang, menjadi bank syariah dan kemudian spin-off Unit Usaha Syariah BTPN Ke bank syariah yang baru ini.

Bank Sahabat didirikan pada tahun 1991 dengan lisensi bank non-devisa. Bank BTPN kemudian mengakuisisi 70% saham di Bank Sahabat pada 30 Januari 2014 dan mengkonversinya menjadi Bank Syariah berdasarkan keputusan OJK tanggal 22 Mei 2014. Unit usaha syariah di BTPN, yang dibentuk pada bulan Maret tahun 2008, spin-off ke bank syariah yang baru pada 14 Juli 2014. BTPN Syariah menaikkan Standard Governance Bank dengan melakukan Initial Public Offering (IPO) pada 8 Mei 2018. Struktur kepemilikan saham BTPN Syariah adalah 70% pemegangnya adalah PT Bank BTPN Tbk dan 30% milik Umum.

4.3.13 Sejarah Bank Net Indonesia Syariah

PT Bank Aladin Syariah Tbk sebelumnya PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk yang berdiri pada tanggal 16 September 1994 dengan nama PT Bank Maybank Nusa International sebagai bank joint venture antara Malaysia dan Indonesia. Perusahaan tersebut sering kali mengalami perubahan nama seiring dengan perubahan kepemilikan saham. pada tahun 2019 perusahaan berganti nama menjadi PT Bank Net Indonesia Syariah yang bergerak dibidang bank umum syariah devisa. Pada 31 Juli 2020 perusahaan memiliki 28 karyawan.

4.3.14 Sejarah Bank NTB Syariah

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank NTB Syariah) merupakan bank milik Pemerintah Provinsi NTB bersama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Nusa Tenggara Barat. Bank NTB Syariah berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 5 Juli 1964. Persiapan pendirian Bank NTB Syariah dilakukan oleh H.Muhammad Syareh, SH yang kemudian menjadi Direktur Utama Bank NTB Syariah. Dengan seiring berjalannya waktu sesuai dengan periode masa jabatan hingga saat 2014 Bapak H.Komari Subakir sebagai Direktur Utama untuk periode tahun 2013-2017.

Pada tanggal 19 Maret 1999 Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dari perusahaan menjadi Persero Terbatas (PT). Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 13 Juni 2016 yang menyetujui PT Bank NTB Syariah melaksanakan konversi menjadi Bank NTB Syariah memberi harapan baru bagi penguatan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan di Nusa Tenggara Barat. Sesuai keputusan tersebut proses konversi bank agar dilaksanakan melalui kajian komprehensif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tanggal 24 September 2018 Bank NTB Syariah resmi melakukan kegiatan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sesuai dengan keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No: Kep-145/D.03/2018 tentang pemberian izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum konvensional menjadi Bank Umum Syariah

PT Bank NTB Syariah menetapkan bahwa memberikan izin kepada PT Bank NTB Syariah yang berkedudukan di Mataram untuk melakukan perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi Bank Umum Syariah dengan nama PT Bank NTB Syariah.

Seiring dengan berjalannya waktu Bank NTB Syariah terus berkembang hingga tahun 2021 ini dengan memiliki kantor yang berjumlah 43 kantor yang terdiri dari 1 kantor pusat, 11 kantor cabang, 22 kantor cabang pembantu, 4 kantor kas dan 5 payment point. Guna untuk mendukung kualitas pelayanan Bank NTB Syariah 155 ATM yang tersebar diseluruh kota/kabupaten se-NTB. Bank NTB Syariah didukung oleh karyawan dan karyawan sampai dengan 31 Maret 2018 dengan jumlah 740 orang.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

Untuk menganalisis suatu kinerja keuangan pada Bank Syariah kita perlu mengetahui suatu penilaian terhadap kemampuan bank dalam menjalankan operasional perbankan secara normal dan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga penilaian ini sangat penting karena untuk mempertahankan kepercayaan dari masyarakat dan hak bank yang benar-benar baik dalam melayani masyarakat. Dengan menggunakan beberapa faktor indikator yang baik atau tidaknya suatu perbankan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/PBI/2011 dan SE No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, penilaian kesehatan bank meliputi faktor-faktor yang sudah diperbaharui.

5.1.1 Analisis Faktor Profile Risk

Penilaian pada faktor profile risk yang dinilai adalah NPF (Non Performing Financing) dan FDR (Financing to Deposito Ratio). Adapun penilaian pada rasio ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

a. Analisis Non Performing Financing (NPF)

Untuk dapat mengetahui risiko dari pembiayaan pada penilaian rasio ini maka dapat dilihat dari segi pembiayaan yang bermasalah antara pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank yang tergolong lancar,

diragukan dan macet kemudian dibagi dengan total pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.

Tabel 5.1

Perhitungan Rasio Non Performing Financing (NPF) 2016-2020

Nama bank	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
BSM	4,92	4,53	3,28	2,66	2,57	3,59
Muamalat Indonesia	3,83	4,43	3,87	5,64	5,69	4,69
Mega Indonesia	3,30	2,95	2,46	1,91	2,27	2,58
Syariah BNI	2,94	2,89	2,93	3,33	3,90	3,20
Syariah BRI	4,57	6,43	6,73	4,45	7,10	5,86
Syariah Bukopin	7,63	7,85	5,71	6,14	7,10	6,89
Jabar dan Banten	17,91	22,04	4,58	4,03	3,96	10,50
Panin Syariah	2,26	12,52	4,81	4,41	3,77	5,55
Victoria Syariah	7,21	4,59	3,99	4,03	4,58	4,88
BCA Syariah	0,50	0,32	0,35	0,59	0,69	0,49
Aceh	1,39	1,38	1,04	1,29	1,64	1,35
BTPN Syariah	1,53	1,67	1,39	1,36	1,43	1,48
Net Indonesia Syariah	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
NTB Syariah	0	0	1,63	1,36	1,45	0,89
Rata-rata Industri						4,34

Sumber : Data Olahan 2021

Berdasarkan perhitungan NPF yang telah dilakukan pada masing-masing Bank Syariah mendapatkan hasil sebagai berikut:

1. PT Bank Mandiri Syariah

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami penurunan persentase. Pada tahun 2016 rasio NPF sebesar 4.92% dan pada tahun 2020 mengalami

penurunan karena kondisi kondisi nasabah sehingga tidak mampu membayar pokok pembiayaan dan juga perjanjian pada yang sudah disepakati sebelumnya. Pada tahun 2020 rasio NPF mencapai 2.57%. Dari data yang sudah ada pada bank ini memiliki rata-rata rasio NPF sebesar 3.59% berada dibawah rata-rata industri yaitu 4.34%. Bila NPF semakin besar artinya bank cenderung mengalami kerugian disebabkan oleh tingkat pengambilan pembiayaan macet yang terdapat penundaan dan sehingga modal yang dimiliki bank akan tertahan sehingga kegiatan tidak akan produktif.

2. PT Bank Syariah Muamalat Indonesia

Pada periode 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase dan memiliki perbedaan pada setiap periode tertentu. Pada tahun 2016-2017 mengalami peningkatan hingga mencapai rasio NPF sebesar 4.43%. ditahun 2018 mengalami penurunan mencapai 3.87%. pada tahun 2020 mengalami penurunan sehingga rasio NPF sebesar 5.69% karena bank dapat mempertahankan kinerja bank yang cukup baik dengan cara mengintesifkan strategi efisiensi biaya melalui penutupan cabang-cabang yang kurang produktif, mengurangi jumlah ATM. Bila NPF semakin besar artinya bank cenderung mengalami kerugian disebabkan oleh tingkat pengembalian pembiayaan macet yang terdapat penundaan sehingga modal yang dimiliki bank akan tertahan sehingga kegiatan tidak akan produktif.

3. PT Bank Syariah Mega Indonesia

Pada periode 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase yang tidak selalu signifikan. Pada tahun 2016-2019 mengalami penurunan hingga rasio NPF mencapai 1.91% ditahun 2020 mengalami peningkatan rasio NPF sebesar 2.27% karena bank fokus kepada penjagaan kualitas aktiva yang sehat melalui pemberian yang sangat selektif serta memaksimalkan account monitoring agar penyelesaian terhadap pembiayaan macet sehingga dapat diatasi sesegera mungkin. Dari data yang sudah ada pada bank tersebut memiliki rata-rata rasio NPF sebesar 2.58% berada dibawah rata-rata industri sebesar 4.34% yang artinya rata-rata kualitas bank dalam pembiayaan secara keseluruhan dari tahun 2016-2020 sehat dilihat dari rata-rata industri.

Bila NPF semakin kecil artinya bank cenderung mendapatkan keuntungan karena jaminan tingkat pengembalian pembiayaan macet baik sehingga modal yang dimiliki bank tidak akan tertahan sehingga kegiatan berjalan secara produktif.

4. PT Bank Syariah BNI

Pada periode 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase, pada tahun 2017 mengalami penurunan sehingga rasio NPF mencapai 2.89%, dan pada tahun 2018-2020 mengalami peningkatan sehingga mencapai 3.90% karena peningkatan kualitas sistem pembiayaan yang melalui upaya bank yang terus menerus menerapkan prinsip kehati-hatian, memperkuat manajemen risiko, memperbaiki sistem pengelolaan pembiayaan.

Dari data yang sudah ada bahwa pada bank tersebut memiliki rata-rata NPF sebesar 3.20% berada dibawah rata-rata industri sebesar 4.34%

yang artinya rata-rata kualitas bank dalam pembiayaan secara keseluruhan dari tahun 2016-2020 sangat sehat dilihat dari rata-rata industri. Bila NPF semakin kecil maka bank cenderung mendapatkan keuntungan karena jaminan tingkat pengembalian pembiayaan macet baik sehingga modal yang dimiliki bank akan berkurang.

5. PT Bank Syariah BRI

Pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase, rasio NPF terkecil terdapat pada tahun 2019 sebesar 4.45% karena adanya kenaikan pembiayaan sehingga dapat menambahkan peluang untuk calon nasabah yang baru dan dapat menggiatkan pendekatan persuasif terhadap nasabah sehingga nasabah dapat membayar pokok pembiayaan dan juga perjanjian yang sudah disepakati. Rasio terbesar NPF terjadi ditahun 2020 dengan rasio sebesar 7.10%.

Dari data yang sudah ada pada bank tersebut memiliki rata-rata rasio sebesar 5.86% berada diatas rata-rata industri yaitu 4.34%. Bila NPF semakin kecil artinya bank cenderung mendapat keuntungan karena jaminan tingkat pengembalian pembiayaan macet baik sehingga modal yang dimiliki bank akan berkurang.

6. PT Bank Syariah Bukopin

Pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase, dan pada tahun

2018 rasio NPF terkecil sebesar 5.71% dengan kualitas pembiayaan yang disalurkan ada kelebihan sedikit lebih baik dari pada tahun-tahun sebelumnya. Rasio NPF terbesar terdapat pada tahun 2017 sebesar 7.85% karena kualitas pembiayaan yang disalurkan kurang baik tidak terpantau secara periodik sehingga kemungkinan nasabah tidak dapat membayar pokok pembiayaan dan juga perjanjian pembiayaan yang sudah disepakati.

Dari data yang sudah ada pada bank ini memiliki rata-rata rasio NPF sebesar 6.89% berada di atas rata-rata industri yaitu 4.34% yang artinya rata-rata kualitas bank dalam pembiayaan secara keseluruhan dari tahun 2016-2020 cukup sehat dilihat dari rata-rata industri.

7. PT Bank Jabar dan Banten

Pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase yang cenderung naik dan signifikan perubahan yang terjadi. Pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan, hingga di tahun 2017 mencapai rasio NPF sebesar 22.04% karena bank tidak mampu menjaga ketidakstabilan perekonomian Indonesia. Pada tahun 2017-2020 terus mengalami penurunan hingga rasio NPF mencapai 3.96% pada tahun 2020. Pada tahun 2016-2017 bank Jabar dan Banten berada di bawah batas ketentuan oleh Bank Indonesia mencapai di atas 12%.

Dari data yang sudah ada bahwa pada bank ini memiliki rata-rata 10.50% berada di atas rata-rata industri yaitu 4.34% yang artinya rata-rata kualitas bank dalam pembiayaan secara keseluruhan dari tahun 2016-

2020 sangat tidak baik dilihat dari rata-rata industri. Bila NPF semakin besar maka bank cenderung mengalami kerugian disebabkan oleh tingkat pengembalian pembiayaan macet sehingga modal yang dimiliki bank akan bertambah.

8. PT Bank Panin Syariah

Pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase, ditahun 2017 mengalami peningkatan hingga rasio NPF mencapai 12.52% dalam kategori tidak sehat. Rasio NPF terkecil terdapat pada tahun 2016 sebesar 2.26%, di setiap tahun 2018-2020 PT Bank Panin Syariah berada dibawah batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 sebesar 5%. Dari data yang sudah ada pada bank ini memiliki rata-rata rasio NPF sebesar 5.55% berada atas rata-rata industri. Bila semakin kecil rasio dari NPF maka semakin sehat rasio tersebut, pada PT Bank Panin Syariah rata-rata industri cukup sehat dibandingkan dari rata-rata rasio NPF nya.

9. PT Bank Victoria Syariah

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase yang meningkat, pada tahun 2016 rasio NPF sebesar 7,21% dalam kondisi cukup sehat. Rasio NPF mengalami penurunan yang terkecil terjadi pada tahun 2018 menjadi 3,99% karena pertumbuhan industri perbankan syariah mengalami pergerakan kearah yang positif sehingga dalam kondisi sehat.

Dari data yang sudah ada bahwa pada bank ini memiliki rata-rata rasio NPF sebesar 4,88% berada diatas rata-rata industri sebesar 4,34%,

yang artinya rata-rata industri sangat sehat dibandingkan rata-rata rasio NPF.

10. PT BCA Syariah

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase, dari tahun 2016-2020 memiliki rata-rata rasio NPF sebesar 0,49%. Dibandingkan dengan bank yang lain PT BCA Syariah memiliki rasio tiap tahunnya sangat sehat. Dari data yang sudah ada pada bank ini rasio NPF sebesar 0,49% berada di bawah rata-rata industri sebesar 4,34%.

11. PT Bank Aceh

Pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase, pada tahun 2020 rasio NPF meningkat hingga mencapai 0,69%. Rata-rata rasio NPF pada bank ini sebesar 1,35% berada dibawah rata-rata industri sebesar 4,34%, artinya rata-rata rasio NPF sangat sehat dibandingkan rata-rata industri. Bila semakin kecil rasio NPF maka semakin sehat bank dalam mendapatkan keuntungan karena jaminan tingkat pengembalian pembiayaan macet baik sehingga modal yang dimiliki bank akan berkurang.

12. PT Bank BTPN Syariah TBK

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase, ditahun 2019 mengalami penurunan hingga rasio NPF sebesar 1,36%. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan hingga rasio NPF mencapai 1,67%, meskipun rasio ditiap tahun nya mengalami fluktuasi rasio pada bank ini masih dalam kategori sangat sehat. Dari data yang sudah ada pada bank ini

rata-rata rasio NPF sebesar 1,48% berada dibawah rata-rata industri yang sebesar 4,34%, yang artinya rata-rata rasio sangat sehat dibandingkan rata-rata industri.

13. PT Bank Net Indonesia Syariah

Pada periode tahun 2016-2020 rata-rata rasio NPF sebesar 8,80%. Ditahun 2016 rasio NPF mencapai 43,99% dalam kategori tidak sehat, dan pada tahun berikutnya bank mampu mendapatkan keuntungan karena jaminan tingkat pengembalian pembiayaan macet baik sehingga modal yang dimiliki bank akan berkurang. Dari data yang sudah ada pada bank ini rata-rata rasio NPF sebesar 8,80% berada diatas rata-rata industri, maka rata-rata industri sangat sehat dibandingkan rata-rata rasio NPF pada bank tersebut.

14. PT Bank NTB Syariah

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase, ditahun 2018 rasio NPF sebesar 1,63% dan ditahun berikutnya menurun hingga 1,36%. Tetapi pada setiap tahunnya rasio dari NPF masih dalam kategori sangat sehat. Dari data yang sudah ada pada bank ini rata-rata rasio NPF sebesar 0,89% berada dibawah rata-rata industri yang sebesar 4,34%, yang artinya rata-rata rasio NPF sangat sehat dibandingkan rata-rata industri.

b. Financing to Deposito Ratio (FDR)

Untuk mengetahui risiko dari likuiditas pada penelitian ini menggunakan rasio (FDR). Rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan

cara membandingkan antara jumlah pembiayaan yang telah diberikan oleh bank dan dana dari pihak ketiga. Pembiayaan yang diberikan ini tidak termasuk dengan pembiayaan pada pihak lain. Dana pihak ketiga adalah giro, tabungan, dan deposito. Batas aman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dari rasio FDR kisaran 75%-120%. Bila rasio FDR berada dibawah standar maka bisa diartikan bahwa bank tidak mampu menyalurkan dana kepada pihak ketiga yang membutuhkan biaya sehingga bank dikatakan tidak mampu menjalankan fungsi tersebut dengan baik.

Tabel 5.2

Perhitungan Rasio Financing to Deposito Ratio (2016-2020)

Nama bank	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
PT Bank Syariah Mandiri	79,19	77,66	77,25	81,41	74,16	77,93
PT Bank Syariah Muamalat Indonesia	95,13	84,41	73,18	68,51	73,80	79,01
PT Bank Syariah Mega Indonesia	95,24	91,05	49,35	99,23	83,73	83,72
PT Bank Syariah BNI	84,57	80,21	79,62	74,31	71,67	78,08
PT Bank Syariah BRI	81,47	71,87	75,49	90,40	91,01	82,05
PT Bank Syariah Bukopin	88,18	82,44	93,40	93,59	161,11	103,74
PT Bank Jabar dan Banten	98,73	91,03	89,85	91,84	100,67	94,42
PT Bank Panin Syariah	91,99	86,95	88,82	97,88	105,47	94,22
PT Bank Victoria Syariah	100,67	83,59	82,78	73,81	79,85	84,14

Nama bank	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
PT BCA Syariah	90,12	88,47	88,99	88,68	94,40	90,13
PT Bank Aceh	84,59	69,44	71,98	68,64	70,66	73,06
PT Bank BTPN Syariah TBK	92,75	92,47	95,60	95,27	94,69	94,16
PT Bank Net Indonesia Syariah	134,73	85,94	424,923	506,600	0,09	186348,75
PT Bank NTB Syariah	0	0	98,93	81,89	70,31	50,23
Rata-rata Industri						13388,12

Sumber : Data Olahan 2021

Berdasarkan perhitungan FDR yang dilakukan pada masing-masing Bank Syariah mendapatkan hasil sebagai berikut:

1. PT Bank Syariah Mandiri

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Rasio FDR terbesar terjadi pada tahun 2019 sebesar 81,41% yang berada dalam kategori sehat dari FDR karena bank telah melakukan intermediasi dengan baik dimana seluruh dana pihak ketiga disalurkan kepada masyarakat, jika semakin tinggi penyaluran dana yang diberikan maka dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan return dari pengguna dana. Pada tahun 2020 rasio FDR masih berada dikategori yang sangat sehat dengan besar rasio 74,16%. Dari data yang sudah ada pada bank ini rata-rata rasio FDR sebesar 77,93% berada dibawah rata-rata industri yang sebesar 13388,12%, yang artinya rata-rata rasio FDR berada dalam kategori sehat dibandingkan rata-rata industri. Namun pada tahun 2020

persentase rasio FDR yaitu sebesar 74,16% berada dibawah standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 75%-120%.

2. PT Bank Syariah Muamalat Indonesia

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase, rasio terbesar terjadi pada tahun 2016 sebesar 95.13% yang berada dalam kategori cukup sehat. Pada tahun 2018-2020 rasio FDR termasuk dalam kategori sangat sehat karena berada dibawah standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 75%-120%. Dari data yang sudah ada pada bank ini rata-rata rasio FDR sebesar 79.01% berada dibawah rata-rata industri yaitu sebesar 13388,12%, yang artinya rata-rata rasio FDR berada dalam kategori sehat dibandingkan rata-rata industri. Dilihat dari rata-rata rasio FDR dari tahun 2016-2020 PT Bank Syariah Muamalat Indonesia masih mampu menyalurkan dana kepada pihak ketiga yang membutuhkan biaya dan total biaya yang diberikan tidak melebihi dana yang dihimpun.

3. PT Bank Syariah Mega Indonesia

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Pada tahun 2018 menjadi rasio FDR terkecil yaitu sebesar 49.35% merupakan dalam kategori yang sangat sehat bahwa berada dibawah standar yang sudah ditetapkan Bank Indonesia yaitu sebesar 75%-120%. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan persentase rasio FDR sebesar 99.23% . Dari data yang sudah ada pada bank ini rata-rata rasio FDR dari tahun 2016-2020 sebesar 83,72% berada dibawah rata-rata industri yang

sebesar 13388.12%, yaitu artinya rata-rata rasio FDR dalam kategori sehat dibandingkan rata-rata industri yang berada dalam kategori tidak sehat.

4. PT Bank Syariah BNI

Pada tahun 2016-2020 mengalami persentase rasio FDR selalu menurun ini sangat baik bagi bank tersebut. Dilihat dari tahun 2019-2020 rasio FDR berada dibawah standar yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 75%-120%. Dari data yang sudah ada pada bank ini rata-rata rasio FDR dari tahun 2016-2020 sebesar 78.08% berada dibawah rata-rata industri yaitu sebesar 13388.12%, yang artinya rata-rata rasio FDR berada pada kategori sehat dibandingkan rata-rata industri yang berada dalam kategori tidak sehat.

5. PT Bank Syariah BRI

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Pada tahun 2020 rasio FDR meningkat sebesar 91.01% dalam kategori cukup sehat. Pada tahun 2017 rasio FDR sebesar 71.87% berada dibawah standar yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 75%-120%. Dari data yang sudah ada pada bank ini dari tahun 2016-2020 rata-rata rasio FDR sebesar 82.05% berada dibawah rata-rata industri yaitu sebesar 13388.12%, yang artinya rata-rata rasio FDR berada dikategori sehat dibandingkan rata-rata industri yang berada dalam kategoru tidah sehat. Sehingga pada PT Bank Syariah BRI masih mampu menyalurkan dana kepada pihak ketiga yang membutuhkan biaya dan total pembiayaan yang diberikan tidak melebihi dana yang dihimpun.

6. PT Bank Syariah Bukopin

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Dari tahun 2018-2020 mengalami peningkatan dimana rasio FDR mencapai 161.11% pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 rasio FDR berada pada kategori sehat, karena bank tidak dapat mengelola dana secara tepat dan konsisten maka terjadilah peningkatan pada tahun berikutnya. Dari data yang sudah ada pada bank ini dari tahun 2016-2020 rata-rata rasio FDR sebesar 103.74% berada dibawah rata-rata industri. Dan pada bank ini tidak dapat menyalurkan dana kepada pihak ketiga karena dalam kategori kurang sehat.

7. PT Bank Jabar dan Banten

Pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Dari tahun 2016-2019 rasio FDR berada dalam ketegori cukup sehat yaitu dibawah dari 100%, dan pada tahun 2020 rasio FDR berada pada kategori kurang sehat dengan besar rasio FDR sebesar 100.67%. dari data yang sudah ada pada bank ini rata-rata rasio FDR sebesar 94.42% berada dibawah rata-rata industri yang sebesar 13388.12%, yang artinya rata-rata rasio FDR berada dalam kategori cukup sehat didandingkan rata-rata industri yang tidak sehat.

8. PT Bank Panin Syariah

Pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Pada tahun 2016 pesertase dari rasio FDR sebesar 91.99% , ditahun 2017 rasio FDR menurun sebesar 86.95%. Ditahun berikutnya dari 2018-2020 rasio FDR

selalu meningkat hingga ditahun 2020 rasio FDR mencapai 105.47% dalam kategori kurang sehat. Dari data yang sudah ada pada bank ini rata-rata rasio FDR PT Bank Panin Syariah sebesar 94.22% berada dibawah rata-rata industri yang sebesar 13388.12%, yang artinya rata-rata rasio FDR dalam kategori cukup sehat dibandingkan rata-rata industri yang dalam kategori tidak sehat.

9. PT Bank Victoria Syariah

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Pada tahun 2016 rasio FDR meningkat hingga mencapai 100.67% karena bank masih berusaha untuk mengelola dana secara tepat, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga untuk tahun ini pengelolaan belum berjalan secara efisien. Pada tahun 2017-2020 mengalami penurunan rasio FDR sebesar 73.81% pada tahun 2019. Pada tahun 2019 rasio FDR hanya sebesar 73.81% berada dibawah standar yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 75%-120%. Dari data yang sudah ada pada bank ini dari tahun 2016-2020 rata-rata rasio FDR sebesar 84.14% dibawah rata-rata industri sebesar 13388.12%, yang artinya rata-rata rasio dalam kategori sehat dibandingkan rata-rata industri yang tidak sehat. Sehingga PT Bank Victoria Syariah masih bisa menyalurkan dana kepada pihak ketiga yang membutuhkan biaya dan total pembiayaan yang diberikan tidak melebihi dana yang dihimpun.

10. PT BCA Syariah

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Pada tahun 2017 menjadi rasio FDR terkecil sebesar 88.47%. Dari tahun 2016-2020 rasio FDR yang tertinggi mencapai 94.40% terjadi pada tahun 2020. Dari data yang sudah ada pada bank ini dari tahun 2016-2020 rata-rata rasio FDR sebesar 90.13% yang berada dibawah rata-rata industri sebesar 13388.12%, yang artinya rata-rata rasio FDR berada dalam kategori cukup sehat dibandingkan rata-rata industri. Sehingga pada PT BCA Syariah masih mampu menyalurkan dana kepada pihak ketiga yang masih membutuhkan biaya.

11. PT Bank Aceh

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Pada tahun 2016 rasio FDR terbesar mencapai 84.59% masih dalam kategori sehat. Pada tahun 2017-2020 rasio FDR berada dibawah standar yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 75%-120%, ditahun 2019 rasio FDR yang terkecil sebesar 68.64%. Dari data yang sudah ada pada bank ini rata-rata rasio FDR dari tahun 2016-2020 sebesar 73.06% berada dibawah rata-rata industri 13388.12%, yang artinya rata-rata rasio FDR berada dalam kategori sangat sehat dibandingkan rata-rata industri yang tidak sehat. Sehingga PT Bank Aceh masih mampu menyalurkan dana kepada pihak ketiga yang membutuhkan biaya dan total pembiayaan yang diberikan tidak melebihi dana yang dihimpun.

12. PT Bank BTPN Syariah TBK

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Ditahun 2018 rasio FDR meningkat hingga 95.60%. Dari data yang sudah ada pada bank ini dari tahun 2016-2020 rata-rata rasio FDR sebesar 94.16% berada dibawah rata-rata industri sebesar 13388.12%, yang artinya rata-rata rasio FDR berada dalam kategori cukup sehat dibandingkan rata-rata industri dalam kategori tidak sehat.

13. PT Bank Net Indonesia Syariah

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Ditahun 2019 rasio FDR sangat meningkat hingga mencapai diatas standar yang telah disepakai oleh Bank Indonesia hingga 506600%. Pada tahun 2020 rasio FDR mengalami penurunan sebesar 0,09%, Maka dari itu PT Bank Net Indonesia Syariah telah resmi berubah menjadi Bank Aladin Syariah pada 3 Juni 2021. Dari data yang sudah ada pada bank ini dari tahun 2016-2020 rata-rata rasio FDR sebesar 186348.75% berada diatas rata-rata industri sebesar 13388.12%, yang artinya rata-rata rasio FDR dan rata-rata industri masih sama-sama berada pada kategori tidak sehat.

14. PT Bank NTB Syariah

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami penurunan persentase. Pada tahun 2016-2017 PT Bank NTB Syariah belum resmi didirikan maka dari itu rasio dari tahun 2016-2017 belum terdaftar di OJK, dan pada tahun 2018 barulah PT Bank NTB Syariah didirikan pada tanggal 24 September 2018. Pada tahun 2018 rasio FDR sebesar 98.93% karena bank masih berusaha untuk dapat mengelola dana yang secara tepat, konsisten dan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pada tahun 2020 rasio FDR menurun hingga mencapai dibawah standar yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 70.31%.

Dari data yang sudah ada pada bank ini dari tahun 2018-2020 memiliki rata-rata rasio FDR sebesar 50.23% berada dibawah rata-rata industri sebesar 13388.12%, yang artinya rata-rata rasio FDR berada pada kategori yang sangat sehat dibandingkan rata-rata industri yang tidak sehat. Sehingga pada PT Bank NTB Syariah masih dapat menyalurkan dana kepada pihak ketiga yang membutuhkan biaya dan total pembiayaan yang dibetikan tidak melebihi dana yang dihimpun.

5.1.2 Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance merupakan suatu peroses dan struktur digunakan untuk mengarah dan mengelola suatu bisnis dan akuntabilitas untuk tujuan utama yaitu mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan stakeholder. GCG merupakan supervise atau monitoring kinerja manajemen dan dapat menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan memperhatikan kerangka peraturan sebagai suatu peningkatan kinerja keuangan.

Didalam penjelasan umum memiliki lima prinsip didalam penilaiannya terdapat transparasi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) kurang diterapkan secara maksimal. Apabila rasio GCG

semakin kecil masa supervise atau monitoring kinerja keuangan tersebut diterapkan secara maksimal.

Tabel 5.3

Good Corporate Governance (GCG) pada setiap bank tahun 2020

No	Nama Bank	Peringkat
1	PT Bank Syariah Mandiri	2
2	PT Bank Syariah Muamalat Indonesia	2
3	PT Bank Syariah Mega Indonesia	1
4	PT Bank Syariah BNI	2
5	PT Bank Syariah BRI	2
6	PT Bank Syariah Bukopin	3
7	PT Bank Jabar dan Banten	2
8	PT Bank Panin Syariah	2
9	PT Bank Victoria Syariah	2
10	PT BCA Syariah	1
11	PT Bank Aceh	2
12	PT Bank BTPN Syariah TBK	2
13	PT Bank Net Indonesia Syariah	2
14	PT Bank NTB Syariah	2
Rata-rata Peringkat		2

Sumber: Laporan GCG 2021

Be

rdasarkan dari perhitungan GCG pada masing-masing Bank Syariah mendapatkan hasil sebagai berikut:

1. PT Bank Syariah Mandiri

Hasil penilaian yang dilakukan oleh tim self assesment PT Bank Syariah Mandiri berada di peringkat ke 2, dan memiliki rata-rata peringkat

ke 2. Penilaian ini dilakukan sendiri oleh pihak PT Bank Syariah Mandiri dengan diawasi langsung oleh Dewan Komisaris Independen.

Tabel 5.4

Catatan hasil penilaian GCG PT Bank Syariah Mandiri

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan dapat menerapkan prinsip GCG dalam menjalankan fungsi pengawasan pada bank tersebut
2	Pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta menjalankan prinsip GCG dengan baik
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite	Komite yang telah dibentuk telah memiliki anggota sesuai dengan persyaratan serta kompetensi yang diperlukan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai komite dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawasan syariah	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah telah dapat berjalan sesuai ketentuan, Dewan Pengawas Syariah telah memastikan bank menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	Seluruh produk penghimpunan dana, penyaluran dana maupun jasa yang diluncurkan oleh bank telah melalui opini Dewan Pengawas Syariah atas kesesuaian produk dengan prinsip syariah
6	Penanganan benturan kepentingan	Bank Syariah Mandiri telah memiliki suatu kebijakan dan aturan

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
		internal dalam mengatur penanganan benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Tindakan tegas ini telah diterapkan dengan baik oleh manajemen bank untuk memberikan efek jera kepada pihak yang melanggarnya
7	Penerapan fungsi kepatuhan bank	Bank Syariah Mandiri telah menerapkan fungsi kepatuhan yang baik. Bank telah memiliki Direktur yang menerapkan fungsi kepatuhan yang concern dalam menangani fungsi kepatuhan
8	Penerapan fungsi audit intern	Bank Syariah Mandiri telah melakukan fungsi audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional dan mendapat dukungan dari personil yang memiliki kompetensi dibidangnya
9	Penerapan fungsi audit ekstern	Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk memiliki kompetensi dibidangnya dan mampu bekerja secara profesional
10	Batas maksimum penyaluran dana	Bank Syariah Mandiri telah menerapkan batas maksimum penyaluran dana kepada pihak terkait dengan baik
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	Bank Syariah Mandiri telah mengirimkan laporan keuangan dan laporan GCG kepada stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku

Sumber : Laporan GCG BSM

Berdasarkan penilaian GCG terhadap 11 aspek mulai dari tahun 2016-2020 PT Bank Syariah Mandiri telah menetapkan aspek-aspek tersebut dengan baik sesuai dengan prinsip keterbukaan (Transparancy) yang berada pada nomor 11, akuntabilitas pada nomor 1, 2, 3, dan 8, tanggung jawab pada no 10,

independensi pada nomor 4, 6, 7 dan kewajaran pada nomor 5 dan 9. Pelaksanaan ini telah dilakukan secara efektif dan efisien menurut ketentuan yang telah berlaku.

2. PT Bank Syariah Muamalat Indonesia

Hasil penilaian yang dilakukan oleh tim self assesment PT Bank Syariah Muamalat Indonesia berada pada peringkat ke 2 dan memiliki rata-rata peringkat ke 2. Penilaian ini dilakukan sendiri oleh pihak PT Bank Syariah Muamalat Indonesia dengan diawasi langsung oleh Dewan Komisaris Independen.

Tabel 5.5

Catatan hasil penilaian GCG PT Bank Syariah Muamalat Indonesia

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan dapat menerapkan prinsip GCG dalam menjalankan fungsi pengawasan pada bank tersebut
2	Pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta menjalankan prinsip GCG dengan baik
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite	Komite yang telah dibentuk telah memiliki anggota sesuai dengan persyaratan serta kompetensi yang diperlukan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai komite dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawasan syariah	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah telah dapat berjalan sesuai

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
		ketentuan, Dewan Pengawas Syariah telah memastikan bank menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	Seluruh produk penghimpunan dana, penyaluran dana maupun jasa yang diluncurkan oleh bank telah melalui opini Dewan Pengawas Syariah atas kesesuaian produk dengan prinsip syariah
6	Penanganan benturan kepentingan	Bank Syariah Muamalat Indonesia telah memiliki suatu kebijakan dan aturan internal dalam mengatur penanganan benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Tindakan tegas ini telah diterapkan dengan baik oleh manajemen bank untuk memberikan efek jera kepada pihak yang melanggarnya
7	Penerapan fungsi kepatuhan bank	Bank Syariah Muamalat Indonesia telah menerapkan fungsi kepatuhan yang baik. Bank telah memiliki Direktur yang menerapkan fungsi kepatuhan yang concern dalam menangani fungsi kepatuhan
8	Penerapan fungsi audit intern	Bank Syariah Muamalat Indonesia telah melakukan fungsi audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional dan mendapat dukungan dari personil yang memiliki kompetensi dibidangnya
9	Penerapan fungsi audit ekstern	Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk memiliki kompetensi dibidangnya dan mampu bekerja secara profesional
10	Batas maksimum penyaluran dana	Bank Syariah Muamalat Indonesia telah menerapkan batas maksimum penyaluran dana kepada pihak

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
		terkait dengan baik
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	Bank Syariah Muamalat Indonesia telah menyampaikan informasi laporan keuangan dan laporan GCG kepada stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku

Sumber : Laporan GCG

Berdasarkan penilaian GCG terhadap 11 aspek mulai dari tahun 2016-2020 PT Bank Syariah Muamalat Indonesia telah menetapkan aspek-aspek tersebut dengan baik sesuai dengan prinsip keterbukaan (Transparency) yang berada pada nomor 11, akuntabilitas pada nomor 1, 2, 3, dan 8, tanggung jawab pada no 10, independensi pada nomor 4, 6, 7 dan kewajaran pada nomor 5 dan 9. Pelaksanaan ini telah dilakukan secara efektif dan efisien menurut ketentuan yang telah berlaku.

3. PT Bank Syariah Mega Indonesia

Hasil penilaian yang dilakukan oleh tim self assesment PT Bank Syariah Mega Indonesia berada pada peringkat ke 1 dan memiliki rata-rata peringkat ke 2. Penilaian ini dilakukan sendiri oleh pihak PT Bank Syariah Mega Indonesia dengan diawasi langsung oleh Dewan Komisaris Independen.

Tabel 5.6

Catatan hasil penilaian GCG PT Bank Syariah Mega Indonesia

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan dapat menerapkan prinsip GCG dalam menjalankan fungsi pengawasan pada bank tersebut
2	Pelaksanaan dan tanggung jawab	Direksi telah melaksanakan tugas

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
	Direksi	dan tanggung jawabnya serta menjalankan prinsip GCG dengan baik
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite	Komite yang telah dibentuk telah memiliki anggota sesuai dengan persyaratan serta kompetensi yang diperlukan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai komite dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawasan syariah	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah telah dapat berjalan sesuai ketentuan, Dewan Pengawas Syariah telah memastikan bank menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	Seluruh produk penghimpunan dana, penyaluran dana maupun jasa yang diluncurkan oleh bank telah melalui opini Dewan Pengawas Syariah atas kesesuaian produk dengan prinsip syariah
6	Penanganan benturan kepentingan	Bank Syariah Mega Indonesia telah memiliki suatu kebijakan dan aturan internal dalam mengatur penanganan benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Tindakan tegas ini telah diterapkan dengan baik oleh manajemen bank untuk memberikan efek jera kepada pihak yang melanggarnya
7	Penerapan fungsi kepatuhan bank	Bank Syariah Mega Indonesia telah menerapkan fungsi kepatuhan yang baik. Bank telah memiliki Direktur yang menerapkan fungsi kepatuhan yang concern dalam menangani fungsi kepatuhan

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
8	Penerapan fungsi audit intern	Bank Syariah Mega Indonesia telah melakukan fungsi audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional dan mendapat dukungan dari personil yang memiliki kompetensi dibidangnya
9	Penerapan fungsi audit ekstern	Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk memiliki kompetensi dibidangnya dan mampu bekerja secara profesional
10	Batas maksimum penyaluran dana	Bank Syariah Mega Indonesia telah menerapkan batas maksimum penyaluran dana kepada pihak terkait dengan baik
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	Bank Syariah Mega Indonesia telah mengirimkan laporan keuangan dan laporan GCG kepada stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku

Sumber : Laporan GCG

Berdasarkan penilaian GCG terhadap 11 aspek mulai dari tahun 2016-2020 PT Bank Syariah Mega Indonesia telah menetapkan aspek-aspek tersebut dengan baik sesuai dengan prinsip keterbukaan (Transparency) yang berada pada nomor 11, akuntabilitas pada nomor 1, 2, 3, dan 8, tanggung jawab pada no 10, independensi pada nomor 4, 6, 7 dan kewajaran pada nomor 5 dan 9. Pelaksanaan ini telah dilakukan secara efektif dan efisien menurut ketentuan yang telah berlaku.

4. PT Bank Syariah BNI

Hasil penilaian yang dilakukan oleh tim self assesment PT Bank Syariah BNI berada pada peringkat ke 2 dan memiliki rata-rata peringkat ke 2. Penilaian ini dilakukan sendiri oleh pihak PT Bank Syariah BNI dengan diawasi langsung oleh Dewan Komisaris Independen.

Tabel 5.7

Catatan hasil penilaian GCG PT Bank Syariah BNI

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan dapat menerapkan prinsip GCG dalam menjalankan fungsi pengawasan pada bank tersebut
2	Pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta menjalankan prinsip GCG dengan baik
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite	Komite yang telah dibentuk telah memiliki anggota sesuai dengan persyaratan serta kompetensi yang diperlukan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai komite dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawasan syariah	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah telah dapat berjalan sesuai ketentuan, Dewan Pengawas Syariah telah memastikan bank menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	Seluruh produk penghimpunan dana, penyaluran dana maupun jasa yang diluncurkan oleh bank telah melalui opini Dewan Pengawas Syariah atas kesesuaian produk dengan prinsip syariah
6	Penanganan benturan kepentingan	Bank Syariah BNI telah memiliki suatu kebijakan dan aturan internal dalam mengatur penanganan benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Tindakan tegas ini telah diterapkan dengan baik oleh manajemen bank

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
		untuk memberikan efek jera kepada pihak yang melanggarnya
7	Penerapan fungsi kepatuhan bank	Bank Syariah BNI telah menerapkan fungsi kepatuhan yang baik. Bank telah memiliki Direktur yang menerapkan fungsi kepatuhan yang concern dalam menangani fungsi kepatuhan
8	Penerapan fungsi audit intern	Bank Syariah BNI telah melakukan fungsi audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional dan mendapat dukungan dari personil yang memiliki kompetensi dibidangnya
9	Penerapan fungsi audit ekstern	Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk memiliki kompetensi dibidangnya dan mampu bekerja secara profesional
10	Batas maksimum penyaluran dana	Bank Syariah BNI telah menerapkan batas maksimum penyaluran dana kepada pihak terkait dengan baik
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	Bank Syariah BNI telah mengirimkan laporan keuangan dan laporan GCG kepada stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku

Sumber : Laporan GCG

Berdasarkan penilaian GCG terhadap 11 aspek mulai dari tahun 2016-2020 PT Bank Syariah BNI telah menetapkan aspek-aspek tersebut dengan baik sesuai dengan prinsip keterbukaan (Transparency) yang berada pada nomor 11, akuntabilitas pada nomor 1, 2, 3, dan 8, tanggung jawab pada nomor 10, independensi pada nomor 4, 6, 7 dan kewajaran pada nomor 5 dan 9. Pelaksanaan ini telah dilakukan secara efektif dan efisien menurut ketentuan yang telah berlaku.

5. PT Bank Syariah BRI

Hasil penilaian yang dilakukan oleh tim self assesment PT Bank Syariah BRI memiliki peringkat ke 2 dan memiliki rata-rata peringkat ke 2. Penilaian ini dilakukan sendiri oleh pihak PT Bank Syariah BRI dengan diawasi langsung oleh Dewan Komisaris Independen.

Tabel 5.8

Catatan hasil penilaian GCG PT Bank Syariah BRI

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan dapat menerapkan prinsip GCG dalam menjalankan fungsi pengawasan pada bank tersebut
2	Pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta menjalankan prinsip GCG dengan baik
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite	Komite yang telah dibentuk telah memiliki anggota sesuai dengan persyaratan serta kompetensi yang diperlukan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai komite dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawasan syariah	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah telah dapat berjalan sesuai ketentuan, Dewan Pengawas Syariah telah memastikan bank menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	Seluruh produk penghimpunan dana, penyaluran dana maupun jasa yang diluncurkan oleh bank telah melalui opini Dewan Pengawas Syariah atas kesesuaian produk

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
		dengan prinsip syariah
6	Penanganan benturan kepentingan	Bank Syariah BRI telah memiliki suatu kebijakan dan aturan internal dalam mengatur penanganan benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Tindakan tegas ini telah diterapkan dengan baik oleh manajemen bank untuk memberikan efek jera kepada pihak yang melanggarnya
7	Penerapan fungsi kepatuhan bank	Bank Syariah BRI telah menerapkan fungsi kepatuhan yang baik. Bank telah memiliki Direktur yang menerapkan fungsi kepatuhan yang concern dalam menangani fungsi kepatuhan
8	Penerapan fungsi audit intern	Bank Syariah BRI telah melakukan fungsi audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional dan mendapat dukungan dari personil yang memiliki kompetensi dibidangnya
9	Penerapan fungsi audit ekstern	Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk memiliki kompetensi dibidangnya dan mampu bekerja secara profesional
10	Batas maksimum penyaluran dana	Bank Syariah BRI telah menerapkan batas maksimum penyaluran dana kepada pihak terkait dengan baik
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	Bank Syariah BRI telah mengirimkan laporan keuangan dan laporan GCG kepada stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku

Sumber: Laporan GCG

Berdasarkan penilaian GCG terhadap 11 aspek mulai dari tahun 2016-2020 PT Bank Syariah BRI telah menetapkan aspek-aspek tersebut dengan baik sesuai dengan prinsip keterbukaan (Transparency) yang berada pada nomor 11,

akuntabilitas pada nomor 1, 2, 3, dan 8, tanggung jawab pada no 10, independensi pada nomor 4, 6, 7 dan kewajaran pada nomor 5 dan 9. Pelaksanaan ini telah dilakukan secara efektif dan efisien menurut ketentuan yang telah berlaku.

6. PT Bank Syariah Bukopin

Hasil penilaian yang dilakukan oleh tim self assesment PT Bank Syariah Bukopin memiliki nilai peringkat ke 2 dan memiliki rata-rata peringkat ke 2. Penilaian ini dilakukan sendiri oleh pihak PT Bank Syariah Bukopin dengan diawasi langsung oleh Dewan Komisaris Independen.

Tabel 5.9

Catatan hasil penilaian GCG PT Bank Syariah Bukopin

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan dapat menerapkan prinsip GCG dalam menjalankan fungsi pengawasan pada bank tersebut
2	Pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta menjalankan prinsip GCG dengan baik
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite	Komite yang telah dibentuk telah memiliki anggota sesuai dengan persyaratan serta kompetensi yang diperlukan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai komite dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawasan syariah	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah telah dapat berjalan sesuai ketentuan, Dewan Pengawas Syariah telah memastikan bank menjalankan usahanya sesuai

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
		dengan prinsip syariah
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	Seluruh produk penghimpunan dana, penyaluran dana maupun jasa yang diluncurkan oleh bank telah melalui opini Dewan Pengawas Syariah atas kesesuaian produk dengan prinsip syariah
6	Penanganan benturan kepentingan	Bank Syariah Bukopin telah memiliki suatu kebijakan dan aturan internal dalam mengatur penanganan benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Tindakan tegas ini telah diterapkan dengan baik oleh manajemen bank untuk memberikan efek jera kepada pihak yang melanggarnya
7	Penerapan fungsi kepatuhan bank	Bank Syariah Bukopin telah menerapkan fungsi kepatuhan yang baik. Bank telah memiliki Direktur yang menerapkan fungsi kepatuhan yang concern dalam menangani fungsi kepatuhan
8	Penerapan fungsi audit intern	Bank Syariah Bukopin telah melakukan fungsi audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional dan mendapat dukungan dari personil yang memiliki kompetensi dibidangnya
9	Penerapan fungsi audit ekstern	Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk memiliki kompetensi dibidangnya dan mampu bekerja secara profesional
10	Batas maksimum penyaluran dana	Bank Syariah Bukopin telah menerapkan batas maksimum penyaluran dana kepada pihak terkait dengan baik
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan	Bank Syariah Bukopin telah mengirimkan laporan keuangan dan

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
	pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	laporan GCG kepada stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku

Sumber : Laporan GCG

Berdasarkan penilaian GCG terhadap 11 aspek mulai dari tahun 2016-2020 PT Bank Syariah Bukopin telah menetapkan aspek-aspek tersebut dengan baik sesuai dengan prinsip keterbukaan (Transparancy) yang berada pada nomor 11, akuntabilitas pada nomor 1, 2, 3, dan 8, tanggung jawab pada no 10, independensi pada nomor 4, 6, 7 dan kewajaran pada nomor 5 dan 9. Pelaksanaan ini telah dilakukan secara efektif dan efisien menurut ketentuan yang telah berlaku.

7. PT Bank Jabar dan Banten

Hasil penilaian yang dilakukan oleh tim self assesment PT Bank Jabar dan Banten memiliki nilai peringkat ke 2 dan memiliki rata-rata peringkat ke 2. Penilaian ini dilakukan sendiri oleh pihak PT Bank Jabar dan Banten dengan diawasi langsung oleh Dewan Komisaris Independen.

Tabel 5.10

Catatan hasil penilaian GCG PT Bank Jabar dan Banten

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan dapat menerapkan prinsip GCG dalam menjalankan fungsi pengawasan pada bank tersebut
2	Pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta menjalankan prinsip GCG dengan baik
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite	Komite yang telah dibentuk telah memiliki anggota sesuai dengan persyaratan serta kompetensi yang

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
		diperlukan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai komite dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawasan syariah	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah telah dapat berjalan sesuai ketentuan, Dewan Pengawas Syariah telah memastikan bank menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	Seluruh produk penghimpunan dana, penyaluran dana maupun jasa yang diluncurkan oleh bank telah melalui opini Dewan Pengawas Syariah atas kesesuaian produk dengan prinsip syariah
6	Penanganan benturan kepentingan	Bank telah memiliki suatu kebijakan dan aturan internal dalam mengatur penanganan benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Tindakan tegas ini telah diterapkan dengan baik oleh manajemen bank untuk memberikan efek jera kepada pihak yang melanggarnya
7	Penerapan fungsi kepatuhan bank	Bank telah menerapkan fungsi kepatuhan yang baik. Bank telah memiliki Direktur yang menerapkan fungsi kepatuhan yang concern dalam menangani fungsi kepatuhan
8	Penerapan fungsi audit intern	Bank telah melakukan fungsi audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional dan mendapat dukungan dari personil yang memiliki kompetensi dibidangnya
9	Penerapan fungsi audit ekstern	Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk memiliki kompetensi

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
		dibidangnya dan mampu bekerja secara profesional
10	Batas maksimum penyaluran dana	Bank telah menerapkan batas maksimum penyaluran dana kepada pihak terkait dengan baik
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	Bank telah mengirimkan laporan keuangan dan laporan GCG kepada stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku

Sumber : Laporan GCG

Berdasarkan penilaian GCG terhadap 11 aspek mulai dari tahun 2016-2020 PT Bank Jabar dan Banten telah menetapkan aspek-aspek tersebut dengan baik sesuai dengan prinsip keterbukaan (Transparancy) yang berada pada nomor 11, akuntabilitas pada nomor 1, 2, 3, dan 8, tanggung jawab pada no 10, independensi pada nomor 4, 6, 7 dan kewajaran pada nomor 5 dan 9. Pelaksanaan ini telah dilakukan secara efektif dan efisien menurut ketentuan yang telah berlaku.

8. PT Bank Panin Syariah

Hasil penilaian yang dilakukan oleh tim self assesment PT Bank Panin Syariah memiliki nilai peringkat ke 2 dan memiliki rata-rata peringkat ke 2. Penilaian ini dilakukan sendiri oleh pihak PT Bank Panin Syariah dengan diawasi langsung oleh Dewan Komisaris Independen.

Tabel 5.11

Catatan hasil penilaian GCG PT Bank Panin Syariah

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan dapat menerapkan prinsip GCG dalam menjalankan fungsi pengawasan pada bank tersebut

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
2	Pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta menjalankan prinsip GCG dengan baik
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite	Komite yang telah dibentuk telah memiliki anggota sesuai dengan persyaratan serta kompetensi yang diperlukan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai komite dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawasan syariah	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah telah dapat berjalan sesuai ketentuan, Dewan Pengawas Syariah telah memastikan bank menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	Seluruh produk penghimpunan dana, penyaluran dana maupun jasa yang diluncurkan oleh bank telah melalui opini Dewan Pengawas Syariah atas kesesuaian produk dengan prinsip syariah
6	Penanganan benturan kepentingan	Bank telah memiliki suatu kebijakan dan aturan internal dalam mengatur penanganan kepentingan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.
7	Penerapan fungsi kepatuhan bank	Bank telah menerapkan fungsi kepatuhan yang baik. Bank telah memiliki Direktur yang menerapkan fungsi kepatuhan yang concern dalam menangani fungsi kepatuhan
8	Penerapan fungsi audit intern	Bank telah melakukan fungsi audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional dan mendapat dukungan dari personil yang memiliki kompetensi

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
		dibidangnya
9	Penerapan fungsi audit ekstern	Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk memiliki kompetensi dibidangnya dan mampu bekerja secara profesional
10	Batas maksimum penyaluran dana	Bank telah menerapkan batas maksimum penyaluran dana kepada pihak terkait dengan baik
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	Bank telah mengirimkan laporan keuangan dan laporan GCG kepada stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku

Sumber : Laporan GCG

Berdasarkan penilaian GCG terhadap 11 aspek mulai dari tahun 2016-2020 PT Bank Panin Syariah telah menetapkan aspek-aspek tersebut dengan baik sesuai dengan prinsip keterbukaan (Transparancy) yang berada pada nomor 11, akuntabilitas pada nomor 1, 2, 3, dan 8, tanggung jawab pada no 10, independensi pada nomor 4, 6, 7 dan kewajaran pada nomor 5 dan 9. Pelaksanaan ini telah dilakukan secara efektif dan efisien menurut ketentuan yang telah berlaku.

9. PT Bank Victoria Syariah

Hasil penilaian yang dilakukan oleh tim self assesment PT Bank Victoria Syariah memiliki nilai peringkat ke 2 dan memiliki rata-rata peringkat ke 2. Penilaian ini dilakukan sendiri oleh pihak PT Bank Victoria Syariah dengan diawasi langsung oleh Dewan Komisaris Independen.

Tabel 5.12

Catatan hasil penilaian GCG PT Bank Victoria Syariah

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
----	--------------------	------------

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan dapat menerapkan prinsip GCG dalam menjalankan fungsi pengawasan pada bank tersebut
2	Pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta menjalankan prinsip GCG dengan baik
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite	Komite yang telah dibentuk telah memiliki anggota sesuai dengan persyaratan serta kompetensi yang diperlukan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai komite dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawasan syariah	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah telah dapat berjalan sesuai ketentuan, Dewan Pengawas Syariah telah memastikan bank menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	Seluruh produk penghimpunan dana, penyaluran dana maupun jasa yang diluncurkan oleh bank telah melalui opini Dewan Pengawas Syariah atas kesesuaian produk dengan prinsip syariah
6	Penanganan benturan kepentingan	Bank telah memiliki suatu kebijakan dan aturan internal dalam mengatur penanganan kepentingan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.
7	Penerapan fungsi kepatuhan bank	Bank telah menerapkan fungsi kepatuhan yang baik. Bank telah memiliki Direktur yang menerapkan fungsi kepatuhan yang concern

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
		dalam menangani fungsi kepatuhan
8	Penerapan fungsi audit intern	Bank telah melakukan fungsi audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional dan mendapat dukungan dari personil yang memiliki kompetensi dibidangnya
9	Penerapan fungsi audit ekstern	Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk memiliki kompetensi dibidangnya dan mampu bekerja secara profesional
10	Batas maksimum penyaluran dana	Bank telah menerapkan batas maksimum penyaluran dana kepada pihak terkait dengan baik
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	Bank telah mengirimkan laporan keuangan dan laporan GCG kepada stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku

Sumber : Laporan GCG

Berdasarkan penilaian GCG terhadap 11 aspek mulai dari tahun 2016-2020 PT Bank Victoria Syariah telah menetapkan aspek-aspek tersebut dengan baik sesuai dengan prinsip keterbukaan (Transparency) yang berada pada nomor 11, akuntabilitas pada nomor 1, 2, 3, dan 8, tanggung jawab pada no 10, independensi pada nomor 4, 6, 7 dan kewajaran pada nomor 5 dan 9. Pelaksanaan ini telah dilakukan secara efektif dan efisien menurut ketentuan yang telah berlaku.

10. PT BCA Syariah

Hasil penilaian yang dilakukan oleh tim self assesment PT BCA Syariah memiliki nilai peringkat ke 1 dan memiliki rata-rata peringkat ke 2. Penilaian ini dilakukan sendiri oleh pihak PT BCA Syariah dengan diawasi langsung oleh Dewan Komisaris Independen.

Tabel 5.13

Catatan hasil penilaian GCG PT BCA Syariah

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan dapat menerapkan prinsip GCG dalam menjalankan fungsi pengawasan pada bank tersebut
2	Pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta menjalankan prinsip GCG dengan baik
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite	Komite yang telah dibentuk telah memiliki anggota sesuai dengan persyaratan serta kompetensi yang diperlukan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai komite dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawasan syariah	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah telah dapat berjalan sesuai ketentuan, Dewan Pengawas Syariah telah memastikan bank menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	Seluruh produk penghimpunan dana, penyaluran dana maupun jasa yang diluncurkan oleh bank telah melalui opini Dewan Pengawas Syariah atas kesesuaian produk dengan prinsip syariah
6	Penanganan benturan kepentingan	Bank telah memiliki suatu kebijakan dan aturan internal dalam mengatur penanganan kepentingan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.
7	Penerapan fungsi kepatuhan bank	Bank telah menerapkan fungsi kepatuhan yang baik. Bank telah

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
		memiliki Direktur yang menerapkan fungsi kepatuhan yang concern dalam menangani fungsi kepatuhan
8	Penerapan fungsi audit intern	Bank telah melakukan fungsi audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional dan mendapat dukungan dari personil yang memiliki kompetensi dibidangnya
9	Penerapan fungsi audit ekstern	Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk memiliki kompetensi dibidangnya dan mampu bekerja secara profesional
10	Batas maksimum penyaluran dana	Bank telah menerapkan batas maksimum penyaluran dana kepada pihak terkait dengan baik
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	Bank telah mengirimkan laporan keuangan dan laporan GCG kepada stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku

Sumber : Laporan GCG

Berdasarkan penilaian GCG terhadap 11 aspek mulai dari tahun 2016-2020 PT BCA Syariah telah menetapkan aspek-aspek tersebut dengan baik sesuai dengan prinsip keterbukaan (Transparency) yang berada pada nomor 11, akuntabilitas pada nomor 1, 2, 3, dan 8, tanggung jawab pada no 10, independensi pada nomor 4, 6, 7 dan kewajaran pada nomor 5 dan 9. Pelaksanaan ini telah dilakukan secara efektif dan efisien menurut ketentuan yang telah berlaku.

11. PT Bank Aceh

Hasil penilaian yang dilakukan oleh tim self assesment PT Bank Aceh memiliki nilai peringkat ke 2 dan memiliki rata-rata peringkat ke 2. Penilaian ini dilakukan sendiri oleh pihak PT Bank Aceh dengan diawasi langsung oleh Dewan Komisaris Independen.

Tabel 5.14
Catatan hasil penilaian GCG PT Bank Aceh

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan dapat menerapkan prinsip GCG dalam menjalankan fungsi pengawasan pada bank tersebut
2	Pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta menjalankan prinsip GCG dengan baik
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite	Komite yang telah dibentuk telah memiliki anggota sesuai dengan persyaratan serta kompetensi yang diperlukan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai komite dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawasan syariah	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah telah dapat berjalan sesuai ketentuan, Dewan Pengawas Syariah telah memastikan bank menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	Seluruh produk penghimpunan dana, penyaluran dana maupun jasa yang diluncurkan oleh bank telah melalui opini Dewan Pengawas Syariah atas kesesuaian produk dengan prinsip syariah
6	Penanganan benturan kepentingan	Bank telah memiliki suatu kebijakan dan aturan internal dalam mengatur penanganan kepentingan sesuai dengan ketentuan yang telah

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
		berlaku.
7	Penerapan fungsi kepatuhan bank	Bank telah menerapkan fungsi kepatuhan yang baik. Bank telah memiliki Direktur yang menerapkan fungsi kepatuhan yang concern dalam menangani fungsi kepatuhan
8	Penerapan fungsi audit intern	Bank telah melakukan fungsi audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional dan mendapat dukungan dari personil yang memiliki kompetensi dibidangnya
9	Penerapan fungsi audit ekstern	Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk memiliki kompetensi dibidangnya dan mampu bekerja secara profesional
10	Batas maksimum penyaluran dana	Bank telah menerapkan batas maksimum penyaluran dana kepada pihak terkait dengan baik
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	Bank telah mengirimkan laporan keuangan dan laporan GCG kepada stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku

Sumber : Laporan GCG

Berdasarkan penilaian GCG terhadap 11 aspek mulai dari tahun 2016-2020 PT Bank Aceh telah menetapkan aspek-aspek tersebut dengan baik sesuai dengan prinsip keterbukaan (Transparency) yang berada pada nomor 11, akuntabilitas pada nomor 1, 2, 3, dan 8, tanggung jawab pada no 10, independensi pada nomor 4, 6, 7 dan kewajaran pada nomor 5 dan 9. Pelaksanaan ini telah dilakukan secara efektif dan efisien menurut ketentuan yang telah berlaku.

12. PT Bank BTPN Syariah TBK

Hasil penilaian yang dilakukan oleh tim self assesment PT Bank BTPN Syariah TBK memiliki nilai peringkat ke 2 dan memiliki rata-rata

peringkat ke 2. Penilaian ini dilakukan sendiri oleh pihak PT Bank BTPN Syariah TBK dengan diawasi langsung oleh Dewan Komisaris Independen.

Tabel 5.15

Catatan hasil penilaian GCG PT Bank BTPN Syariah TBK

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan dapat menerapkan prinsip GCG dalam menjalankan fungsi pengawasan pada bank tersebut
2	Pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta menjalankan prinsip GCG dengan baik
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite	Komite yang telah dibentuk telah memiliki anggota sesuai dengan persyaratan serta kompetensi yang diperlukan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai komite dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawasan syariah	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah telah dapat berjalan sesuai ketentuan, Dewan Pengawas Syariah telah memastikan bank menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	Seluruh produk penghimpunan dana, penyaluran dana maupun jasa yang diluncurkan oleh bank telah melalui opini Dewan Pengawas Syariah atas kesesuaian produk dengan prinsip syariah

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
6	Penanganan benturan kepentingan	Bank telah memiliki suatu kebijakan dan aturan internal dalam mengatur penanganan kepentingan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.
7	Penerapan fungsi kepatuhan bank	Bank telah menerapkan fungsi kepatuhan yang baik. Bank telah memiliki Direktur yang menerapkan fungsi kepatuhan yang concern dalam menangani fungsi kepatuhan
8	Penerapan fungsi audit intern	Bank telah melakukan fungsi audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional dan mendapat dukungan dari personil yang memiliki kompetensi dibidangnya
9	Penerapan fungsi audit ekstern	Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk memiliki kompetensi dibidangnya dan mampu bekerja secara profesional
10	Batas maksimum penyaluran dana	Bank telah menerapkan batas maksimum penyaluran dana kepada pihak terkait dengan baik
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	Bank telah mengirimkan laporan keuangan dan laporan GCG kepada stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku

Sumber : Laporan GCG

Berdasarkan penilaian GCG terhadap 11 aspek mulai dari tahun 2016-2020 PT Bank BTPN Syariah TBK telah menetapkan aspek-aspek tersebut dengan baik sesuai dengan prinsip keterbukaan (Transparency) yang berada pada nomor 11, akuntabilitas pada nomor 1, 2, 3, dan 8, tanggung jawab pada no 10, independensi pada nomor 4, 6, 7 dan kewajaran pada nomor 5 dan 9. Pelaksanaan ini telah dilakukan secara efektif dan efisien menurut ketentuan yang telah berlaku.

13. PT Bank Net Indonesia Syariah/ Bank Aladin Syariah

Hasil penilaian yang dilakukan oleh tim self assesment PT Bank Net Indonesia Syariah memiliki nilai peringkat ke 2 dan memiliki rata-rata peringkat ke 2. Penilaian ini dilakukan sendiri oleh pihak PT Bank Net Indonesia Syariah dengan diawasi langsung oleh Dewan Komisaris Independen.

Tabel 5.16

Catatan hasil penilaian GCG PT Bank Net Indonesia Syariah

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan dapat menerapkan prinsip GCG dalam menjalankan fungsi pengawasan pada bank tersebut
2	Pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta menjalankan prinsip GCG dengan baik
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite	Komite yang telah dibentuk telah memiliki anggota sesuai dengan persyaratan serta kompetensi yang diperlukan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai komite dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawasan syariah	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah telah dapat berjalan sesuai ketentuan, Dewan Pengawas Syariah telah memastikan bank menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	Seluruh produk penghimpunan dana, penyaluran dana maupun jasa yang diluncurkan oleh bank telah melalui opini Dewan Pengawas Syariah atas kesesuaian produk dengan prinsip syariah
6	Penanganan benturan kepentingan	Bank telah memiliki suatu kebijakan dan aturan internal dalam mengatur penanganan kepentingan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.
7	Penerapan fungsi kepatuhan bank	Bank telah menerapkan fungsi kepatuhan yang baik. Bank telah memiliki Direktur yang menerapkan fungsi kepatuhan yang concern dalam menangani fungsi kepatuhan
8	Penerapan fungsi audit intern	Bank telah melakukan fungsi audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional dan mendapat dukungan dari personil yang memiliki kompetensi dibidangnya
9	Penerapan fungsi audit ekstern	Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk memiliki kompetensi dibidangnya dan mampu bekerja secara profesional
10	Batas maksimum penyaluran dana	Bank telah menerapkan batas maksimum penyaluran dana kepada pihak terkait dengan baik
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	Bank telah mengirimkan laporan keuangan dan laporan GCG kepada stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku

Sumber : Laporan GCG

Berdasarkan penilaian GCG terhadap 11 aspek mulai dari tahun 2016-2020 PT Bank Net Indonesia Syariah telah menetapkan aspek-aspek tersebut dengan baik sesuai dengan prinsip keterbukaan (Transparency) yang berada pada

nomor 11, akuntabilitas pada nomor 1, 2, 3, dan 8, tanggung jawab pada no 10, independensi pada nomor 4, 6, 7 dan kewajaran pada nomor 5 dan 9. Pelaksanaan ini telah dilakukan secara efektif dan efisien menurut ketentuan yang telah berlaku.

14. PT Bank NTB Syariah

Hasil penilaian yang dilakukan oleh tim self assesment PT Bank NTB Syariah memiliki nilai peringkat ke 2 dan memiliki rata-rata peringkat ke 2. Penilaian ini dilakukan sendiri oleh pihak PT Bank NTB Syariah dengan diawasi langsung oleh Dewan Komisaris Independen.

Tabel 5.17

Catatan hasil penilaian GCG PT Bank NTB Syariah

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan dapat menerapkan prinsip GCG dalam menjalankan fungsi pengawasan pada bank tersebut
2	Pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta menjalankan prinsip GCG dengan baik
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite	Komite yang telah dibentuk telah memiliki anggota sesuai dengan persyaratan serta kompetensi yang diperlukan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai komite dalam mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawasan syariah	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah telah dapat berjalan sesuai ketentuan, Dewan Pengawas Syariah telah memastikan bank

No	Aspek Yang Dinilai	Keterangan
		menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	Seluruh produk penghimpunan dana, penyaluran dana maupun jasa yang diluncurkan oleh bank telah melalui opini Dewan Pengawas Syariah atas kesesuaian produk dengan prinsip syariah
6	Penanganan kepentingan benturan	Bank telah memiliki suatu kebijakan dan aturan internal dalam mengatur penanganan kepentingan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.
7	Penerapan fungsi kepatuhan bank	Bank telah menerapkan fungsi kepatuhan yang baik. Bank telah memiliki Direktur yang menerapkan fungsi kepatuhan yang concern dalam menangani fungsi kepatuhan
8	Penerapan fungsi audit intern	Bank telah melakukan fungsi audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional dan mendapat dukungan dari personil yang memiliki kompetensi dibidangnya
9	Penerapan fungsi audit ekstern	Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk memiliki kompetensi dibidangnya dan mampu bekerja secara profesional
10	Batas maksimum penyaluran dana	Bank telah menerapkan batas maksimum penyaluran dana kepada pihak terkait dengan baik
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	Bank telah mengirimkan laporan keuangan dan laporan GCG kepada stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku

Sumber : Laporan GCG

Berdasarkan penilaian GCG terhadap 11 aspek mulai dari tahun 2016-2020 PT Bank NTB Syariah telah menetapkan aspek-aspek tersebut dengan baik

sesuai dengan prinsip keterbukaan (Transparency) yang berada pada nomor 11, akuntabilitas pada nomor 1, 2, 3, dan 8, tanggung jawab pada no 10, independensi pada nomor 4, 6, 7 dan kewajaran pada nomor 5 dan 9. Pelaksanaan ini telah dilakukan secara efektif dan efisien menurut ketentuan yang telah berlaku.

5.1.3 Analisis Earning

Pada penilaian rasio ini yang digunakan untuk menilai faktor tersebut adalah ROA, ROE dan BOPO. Adapun hasil dari penilaian rasio ini adalah sebagai berikut:

a. Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA) biasanya digunakan perusahaan untuk melihat seberapa efisiennya perusahaan dalam mengelola asetnya untuk dapat memperoleh keuntungan selama satu periode. Jika rasio ROA yang dihasilkan semakin semakin besar maka keuntungan juga semakin baik. Bila rasio ROA semakin kecil maka dilihat dari pengelolaan aset secara umum kurang efisien. Pada rasio ROA bisa digunakan suatu perusahaan untuk melihat seberapa efisiennya perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan dalam suatu periode tersebut.

Tabel 5.18

Perhitungan Rasio Return On Asset (ROA)

Nama bank	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
PT Bank Syariah Mandiri	0,59	0,59	0,88	1,57	1,73	1,07
PT Bank Syariah Muamalat Indonesia	0,22	0,11	0,08	0,02	0,03	0,09

Nama bank	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
PT Bank Syariah Mega Indonesia	2,63	1,56	0,96	0,65	0,95	1,35
PT Bank Syariah BNI	1,44	1,31	1,42	1,82	1,45	1,49
PT Bank Syariah BRI	0,95	0,51	0,43	0,32	0,90	0,62
PT Bank Syariah Bukopin	-1,12	0,02	0,02	0,03	0,02	-0,21
PT Bank Jabar dan Banten	-8,09	-5,69	0,54	0,39	0,44	-2,48
PT Bank Panin Syariah	0,37	-10,77	0,26	0,16	0,04	-1,99
PT Bank Victoria Syariah	-2,19	0,36	0,32	0,06	0,02	-0,29
PT BCA Syariah	1,13	1,17	1,17	1,00	0,89	1,07
PT Bank Aceh	0,52	2,51	2,38	2,33	1,67	1,88
PT Bank BTPN Syariah TBK	8,98	11,19	12,37	13,58	13,58	11,94
PT Bank Net Indonesia Syariah	-9,51	5,5	-6,86	11,15	17,22	3,50
PT Bank NTB Syariah			1,92	2,56	1,84	2,11
Rata-rata Industri						1,44

Sumber : Data Olah 2021

Berdasarkan perhitungan dari rasio ROA yang dilakukan pada masing-masing Bank Syariah mendapatkan hasil sebagai berikut:

1. PT Bank Syariah Mandiri

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami peningkatan hingga mencapai 1.73% pada tahun 2020. Dari data yang sudah ada pada bank ini memiliki rata-rata rasio ROA sebesar 1.07% berada dibawah rata-rata industri yaitu sebesar 1.44%, yang artinya rata-rata industri lebih sehat dibandingkan rata-rata rasio ROA yang dalam kategori cukup sehat. Bila rasio ROA yang dihasil kan semakin besar maka keuntungan selama periode dilihat dari rata-rata industri dari tahun 2016-2020 sudah efektif, karena bila ROA yang dihasilkan semakin kecil maka keuntungan yang

dicapai juga semakin kecil sehingga bila dilihat dari pengelolaan aset secara umum kurang efisien.

2. PT Bank Syariah Muamalat Indonesia

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Pada tahun 2016-2019 menurun hingga mencapai 0.02%, hingga tahun 2020 kembali meningkat tidak terlalu tinggi hanya mencapai 0.03%. Pada bank ini dari tahun 2016-2020 selalu dalam kategori dibawah kata sehat. Dari data yang sudah ada pada bank ini rata-rata rasio ROA sebesar 0.09% berada dibawah rata-rata industri yang sebesar 1.44%, yang artinya rata-rata industri dalam kategori sehat dibandingkan rata-rata rasio ROA dalam kategori tidak sehat.

3. PT Bank Syariah Mega Indonesia

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Pada tahun 2016 rasio ROA sangat tinggi yaitu sebesar 2.63% karena disebabkan oleh aset produktif yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga dikatakan bahwa aset yang digunakan berjalan dengan baik. Dari data yang sudah ada pada bank ini memiliki rasio ROA yang mengalami fluktuasi dan memiliki rata-rata rasio ROA sebesar 1.35% berada dibawah rata-rata industri yaitu sebesar 1.44%, artinya bank belum mencapai efisiensi daalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan selama periode dilihat dari rata-rata industri sejak tahun 2016-2020. Yang artinya jika rasio ROA semakin besar maka keuntungan yang didapat akan semakin besar sehingga aset yang digunakan semakin baik.

4. PT Bank Syariah BNI

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Pada tahun 2019 rasio ROA meningkat hingga mencapai 1.82% dan ini melebihi batas yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Dari tahun 2016-2020 rasio ROA yang ada pada bank ini masih termasuk dalam kategori sehat. Dari data yang sudah ada pada bank ini rata-rata rasio ROA sebesar 1.49% berada diatas rata-rata industri sebesar 1.44% artinya bank sudah mencapai efisiensi dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan selama periode dari tahun 2016-2020 sehingga untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan aset juga sudah efektif. Dari rata-rata rasio ROA dan rata-rata industri maka sama-sama berada dikategori yang sehat.

5. PT Bank Syariah BRI

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Ditahun 2016 meningkat hingga rasio ROA mencapai 0.95% dan pada tahun 2019 rasio ROA menurun drastis hingga sebesar 0.32%. dari data yang sudah ada pada bank ini bahwa rata-rata rasio ROA sebesar 0.62% berada dibawah rata-rata industri yang sebesar 1.44%, yang artinya rata-rata industri berada dalam kategori sehat dibandingkan rata-rata rasio ROA yaitu sebesar 0.62%. Apabila rasio ROA cenderung lebih kecil maka memberikan pengaruh negataif, karena bila ROA yang dihasilkan semakin kecil maka laba yang didapat juga semakin kecil sehingga jika dilihat dari pengelolaan aset secara umum kurang efisien.

6. PT Bank Syariah Bukopin

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Dari tahun 2016-2020 rasio ROA mengalami peningkatan dan penurunan disetiap tahunnya. Pada tahun 2016 rasio ROA terkecil hingga mencapai -1.12% karena pada tahun ini bank mendapat tekanan dari likuiditas yang bersumber dari meningkatnya biaya dana. Pada tahun 2019 rasio ROA meningkat sebesar 0.03% karena bank mampu meningkatkan total aset sehingga bank mampu mencapai aset terbesar yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Dari data yang sudah ada pada bank ini dilihat dari rata-rata rasio ROA dari tahun 2016-2020 sebesar -0.21% berada dibawah rata-rata industri yang sebesar 1.44%, yang artinya rata-rata rasio ROA dalam kategori tidak sehat dibandingkan rata-rata industri yang dalam kategori sehat.

7. PT Bank Jabar dan Banten

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Pada tahun 2016-2017 rasio ROA berada dalam kategori yang tidak sehat, yaitu -8.09% dan -5.69%. pada tahun 2018 mengalami peningkatan rasio ROA yaitu sebesar 0.54%. pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan lagi sehingga rasio ROA sebesar 0.44% pada tahun 2020. Dari data yang sudah ada pada bank ini dilihat rata-rata rasio ROA mencapai kategori yang tidak sehat yaitu sebesar -2.48% berada dibawah rata-rata industri yang sebesar 1.44%, yang artinya rata-rata rasio ROA berada dalam

kategori tidak sehat dibandingkan rata-rata industri yaitu dalam kategori sehat.

8. PT Bank Panin Syariah

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Pada tahun 2016 rasio ROA sangat meningkat mencapai sebesar 0.37%, pada tahun 2017 rasio ROA sangat menurun secara drastis yaitu sebesar -10.77%. Dari data yang sudah ada pada PT Bank Panin Syariah memiliki rata-rata rasio ROA sebesar -1.99% berada dibawah rata-rata industri sebesar 1.44%, yang artinya rata-rata rasio ROA berada dalam kategori yang tidak sehat, sedangkan rata-rata industri berada dalam kategori sehat, artinya bank belum mencapai efisiensi dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan dalam suatu periode dilihat dari rata-rata industri sejak tahun 2016-2020 sehingga untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan aset juga belum efektif. Artinya ROA yang dihasilkan semakin besar maka keuntungan yang didapatkan juga semakin besar sehingga aset yang digunakan juga semakin baik dan pada bank ini menghasilkan rasio ROA yang cenderung kecil sehingga memperoleh angka minus maka akan mendapatkan pengaruh yang negatif.

9. PT Bank Victoria Syariah

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Diawal tahun 2016 rasio ROA menurun sehingga mencapai angka minus yaitu sebesar -2.19%. Pada tahun 2017 rasio ROA meningkat sebesar 0.36%, dan pada tahun selanjutnya rasio ROA mengalami penurunan terus

hingga mencapai 0.02% pada tahun 2020. Dari data yang sudah ada pada PT Bank Victoria Syariah bahwa rata-rata rasio ROA sebesar -0.29% berada dibawah rata-rata industri yang sebesar 1.44%, yang artinya rata-rata rasio ROA berada dalam kategori tidak sehat dan rata-rata industri berada dalam kategori sehat, sehingga ROA yang dihasilkan semakin besar maka keuntungan yang didapat juga semakin besar sehingga aset yang digunakan juga semakin baik bagi bank memiliki rasio ROA yang cenderung kecil hingga memperoleh pengaruh negatif, karena bila ROA yang dihasilkan kecil maka laba yang didapat juga kecil sehingga bila dilihat dari pengelola aset secara umum sangat tidak efisien.

10. PT BCA Syariah

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Pada tahun 2016-2020 rasio ROA mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Pada PR BCA Syariah rasio ROA terkecil hanya sebesar 0.89% pada tahun 2020, pada tahun 2017-2018 rasio ROA terbesar sama-sama mencapai 1.17%. Dari data yang sudah ada pada PT BCA Syariaiah memiliki rasio ROA rata-rata sebesar 1.07% berada dibawah rata-rata industri yaitu 1.44% artinya bank belum mencapai efisiensi dalam mengelola asetnya. Dilihat sejak tahun 2016-2020 rata-rata rasio ROA berada dalam kategori cukup sehat, dan rata-rata industri berada dalam kategori sehat.

11. PT Bank Aceh

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Pada tahun 2016 mengalami rasio ROA terkecil sebesar 0.52%, dan pada tahun 2017 meningkatnya rasio ROA sebesar 2.51%. Dari data yang sudah ada pada PT Bank Aceh memiliki rata-rata rasio ROA sebesar 1.88% berada diatas rata-rata industri yaitu sebesar 1.44% artinya bank sudah mencapai efisiensi dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan selama suatu periode dan dilihat dari rata-rata industri pada tahun 2016-2020 sehingga untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan aset sudah efektif. Apabila ROA yang dihasilkan semakin besar maka akan memberikan pengaruh yang positif.

12. PT Bank BTPN Syariah TBK

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami peningkatan persentase disetiap tahunnya. Pada tahun 2016 adalah rasio ROA yang terkecil sebesar 8.98%, dan pada tahun berikutnya rasio ROA meningkat hingga mencapai sebesar 13.58% pada tahun 2020. Dilihat dari data yang sudah ada pada PT Bank BTPN Syariah TBK, bahwa rata-rata rasio berada diatas standar yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia, rata-rata rasio ROA yaitu sebesar 11.94% berada diatas rata-rata industri yaitu sebesar 1.44%. Artinya ROA yang dihasilkan semakin besar sehingga aset yang digunakan juga semakin baik pada bank ini, memiliki rasio ROA yang cenderung baik maka akan memeberikan pengaruh yang positif.

13. PT Bank Net Indonesia Syariah

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Pada tahun 2016 rasio ROA terkecil sebesar -9.51% dan tahun 2020 rasio ROA menjadi 17.23% yang menjadi rasio ROA terbesar karena total aset yang dimiliki bank meningkat sehingga aset yang digunakan pada tempat produktif berjalan dengan baik. Dari data yang sudah ada pada PT Bank Net Indonesia Syariah bahwa rata-rata rasio ROA sebesar 3,50% berada diatas rata-rata industri yaitu sebesar 1.44%, artinya ROA yang dihasilkan oleh rata-rata rasio berada dalam kategori sangat sehat, sedangkan rata-rata industri berada dalam kategori cukup sehat.

14. PT Bank NTB Syariah

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Tetapi bank ini pada tahun 2016-2017 belum beroperasi maka bisa dilihat ditahun berikutnya rasio ROA terbesar yaitu sebesar 2.56% berada pada tahun 2019. Pada tahun 2020 rasio ROA menurun sebesar 1.84%. Dari data yang sudah ada pada PT Bank NTB Syariah bahwa rata-rata rasio ROA sebesar 2.11% berada dibawah rata-rata industri yaitu sebesar 1.44%, artinya rata-rata rasio ROA sangat sehat dibandingkan rata-rata industri, apabila rasio ROA semakin besar maka akan baik bagi bank tersebut.

b. Return On Equity (ROE)

Return On Equity (ROE) atau sering disebut dengan Rentabilitas Modal Sendiri untuk dapat mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak milik modal sendiri. Bila rasio ROE yang dihasilkan semakin besar maka

keuntungan yang didapat juga semakin besar sehingga bila dilihat dari penggunaan aset juga semakin baik begitu juga sebaliknya. Rasio ROE bisa digunakan perusahaan untuk melihat seberapa efisiennya perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan selama suatu periode tersebut.

Tabel 5.19
Return On Equity (ROE)

Nama bank	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
PT Bank Syariah Mandiri	5,81	5,71	8,21	15,66	15,71	10,22
PT Bank Syariah Muamalat Indonesia	3,00	0,87	1,16	0,26	0,29	1,12
PT Bank Syariah Mega Indonesia	11,97	6,75	4,19	3,16	4,92	6,20
PT Bank Syariah BNI	11,94	11,42	10,53	13,54	10,86	11,66
PT Bank Syariah BRI	7,50	5,86	2,49	1,60	4,87	4,46
PT Bank Syariah Bukopin	13,74	0,20	0,26	0,28	0,15	2,93
PT Bank Jabar dan Banten	-49,05	-58,64	2,63	3,06	3,63	-19,67
PT Bank Panin Syariah	1,76	-94,01	1,54	0,88	0,25	-17,92
PT Bank Victoria Syariah	-17,45	2,01	2,02	0,47	0,15	-2,56
PT BCA Syariah	3,45	4,28	5,01	3,47	2,40	3,72
PT Bank Aceh	5,59	23,11	23,29	23,44	12,76	17,64
PT Bank BTPN Syariah TBK	31,71	36,50	30,82	31,20	29,77	32,00
PT Bank Net Indonesia Syariah	-27,62	-1,78	-11,28	13,78	19,67	-1,45
PT Bank NTB Syariah			8,92	12,05	9,27	10,08
Rata-rata Industri						4,17

Sumber : Data Olah 2021

Berdasarkan perhitungan ROE yang dilakukan pada masing-masing Bank Syariah mendapatkan hasil sebagai berikut:

1. PT Bank Syariah Mandiri

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Pada tahun 2017 mengalami penurunan dengan rasio ROE sebesar 5.71%, pada tahun berikutnya mengalami peningkatan sehingga rasio ROE terbesar mencapai 15.71% pada tahun 2020. Dari data yang sudah ada pada PT Bank Syariah Mandiri rata-rata rasio ROE sebesar 10.22% berada diatas rata-rata industri yaitu sebesar 4.17%, yang artinya rata-rata rasio ROE dalam kategori cukup sehat dibandingkan rata-rata industri yang dalam kategori kurang sehat. Apabila rasio ROE pada bank ini lebih besar maka keuntungan yang didapat akan lebih besar juga.

2. PT Bank Syariah Muamalat Indonesia

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 rasio ROE terbesar mencapai 3.00%, namun pada tahun 2020 rasio ROE mengalami penurunan lagi sehingga mencapai 0.29%. Dari data yang sudah ada pada PT Bank Syariah Muamalat Indonesia dilihat dari rata-rata rasio ROE sebesar 1.12% berada dibawah rata-rata industri yaitu sebesar 4.17%, yang artinya rata-rata rasio ROE berada dalam kategori tidak sehat dan rata-rata industri berada dalam kategori kurang sehat. Bila ROE yang dihasilkan semakin kecil maka keuntungan yang didapat akan semakin kecil pula sehingga dilihat dari pengelolaan aset secara umum kurang efisien.

3. PT Bank Syariah Mega Indonesia

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Pada rasio ROE terkecil sebesar 3.16% terdapat ditahun 2019. Dari tahun 2016-2020 rasio ROE terbesar hingga mencapai 11.97% terdapat ditahun 2016. Dari data yang sudah ada pada PT Bank Syariah Mega Indonesia terdapat rata-rata rasio ROE sebesar 6.20% berada dibawah rata-rata industri yaitu sebesar 4.17%, yang artinya rata-rata rasio ROE berada dalam kategori cukup sehat dibandingkan rata-rata industri berada dalam kategori kurang sehat.

4. PT Bank Syariah BNI

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Pada tahun 2019 dimana rasio ROE terbesar hingga mencapai 13.54%, sehingga pada tahun 2020 rasio ROE menurun kembali sebesar 10.86%. Dari data yang sudah ada pada PT Bank Syariah BNI terdapat rata-rata rasio ROE sebesar 11.66% berada diatas rata-rata industri yaitu sebesar 4.17%, artinya bank sudah mencapai efisiensi dalam mengelola asetnya. Dilihat dari rata-rata rasio ROE berada dalam kategori cukup sehat dibandingkan rata-rata indutri berada dalam ketegori kurang sehat.

5. PT Bank Syariah BRI

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Pada tahun 2016 terdapat rasio ROE terbesar mencapai 7.50%, dan pada tahun 2019 terdapat rasio ROE terkecil hingga mencapai 1.60%. Dari data yang sudah ada pada PT Bank Syariah BRI terdapat rata-rata rasio ROE

sebesar 4.46% berada diatas rata-rata industri yaitu sebesar 4.17%, yang artinya dilihat bahwa rata-rata rasio ROE dan rata-rata industri sama-sama dalam kategori kurang sehat.

6. PT Bank Syariah Bukopin

Pada periode tahun 2016-2020 bank syariah mengalami penurunan persentase. Pada tahun 2016 terdapat rasio ROE terbesar hingga mencapai 13.74% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan rasio ROE sebesar 0.15%. dari data yang sudah ada pada PT Bank Syariah Bukopin dilihat bahwa rata-rata rasio ROE sebesar 2.93% berada dibawah rata-rata industri sebesar 4.17%, yang artinya rata-rata rasio ROE berada dalam kategori tidak sehat dan rata-rata industri dalam kategori kurang sehat.

7. PT Bank Jabar dan Banten

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami peningkatan persentase. Pada rasio ROE terkecil sebesar -58.64% terdapat pada tahun 2017, dan mengalami peningkatan kembali sehingga mencapai 3.63% pada tahun 2020. Dari data yang sudah ada pada PT Bank Jabar dan Banten bahwa terdapat rata-rata rasio ROE sebesar -19.67% berada dibawah rata-rata industri artinya bank belum mencapai efisiensi untuk mendapatkan keuntungan selama suatu periode tersebut. PT Bank Jabar dan Banten memiliki rasio ROE yang cenderung kecil sehingga memperoleh angka minus maka akan memberikan pengaruh negatif.

8. PT Bank Panin Syariah

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Pada tahun 2017 mengalami rasio ROE terkecil sebesar -94.01% dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 1.54%. Dari data yang sudah ada pada bank ini rata-rata rasio ROE sebesar -17.92% berada dibawah rata-rata industri yaitu sebesar 4.17% artinya bank belum mencapai efisien dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan selama suatu periode dilihat dari rata-rata rasio ROE. Apabila rata-rata rasio ROE berada dibawah rata-rata industri maka rata-rata rasio ROE dalam kategori tidak sehat dibandingkan rata-rata industri.

9. PT Bank Victoria Syariah

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Pada tahun 2016 terjadinya rasio ROE terkecil yaitu sebesar -17.45% dan ditahun 2017 rasio ROE meningkat menjadi 2.01% . Pada tahun 2018-2020 terus mengalami penurunan sehingga pada tahun 2020 menjadi 0.15%. Dari data yang sudah ada pada bank ini pada tahun 2016-2020 rata-rata rasio ROE sebesar -2.56% berada dibawah rata-rata industri yaitu sebesar 4.17%, artinya rata-rata rasio ROE dalam kategori tidak sehat dibandingkan rata-rata industri yang berada dalam kategori kurang sehat. Jika ROE yang dihasilkan semakin besar maka keuntungan yang didapatkan semakin baik, jika rasio ROE yang cenderung kecil hingga memperoleh angka minus maka akan memberikan pengaruh yang negatif.

10. PT BCA Syariah

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Pada rasio ROE yang terbesar yaitu sebesar 5.01% terdapat pada tahun 2018, dan rasio ROE terkecil sebesar 2.40% terjadi ditahun 2020. Dari data yang sudah ada pada PT BCA Syariah memiliki rata-rata rasio ROE sebesar 3.72% berada dibawah rata-rata industri yaitu sebesar 4.17%, artinya rata-rata rasio ROE dan rata-rata industri sama-sama berada dalam kategori kurang sehat.

11. PT Bank Aceh

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Dari rasio ROE terkecil sebesar 5.59% pada tahun 2016, pada tahun 2019 mengalami peningkatan sehingga mencapai 23.44%. Pada tahun 2017-2019 rasio ROE berada diatas standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dari data yang sudah ada pada bank ini memiliki rata-rata rasio ROE sebesar 17.64% berada diatas rata-rata industri sebesar 4.17% artinya bank sudah mencapai efisien dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan selama periode. Jika ROE yang dihasilkan semakin besar maka keuntungan yang didapat juga akan semakin besar sehingga aset yang digunakan juga semakin baik, rasio ROE yang cenderung besar dibeberapa periode maka akan memberikan pengaruh yang positif.

12. PT Bank BTPN Syariah TBK

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Dari tahun 2016-2020 rasio ROE berada diatas standar rasio yang telah

ditentukan oleh Bank Indonesia. Rasio terkecil sebesar 29.77% pada tahun 2020, dan rasio terbesar 36.50% pada tahun 2017. Dari data yang sudah ada pada bank ini rata-rata rasio ROE sebesar 32.00% berada diatas rata-rata industri sebesar 4.17% artinya bank sudah mencapai efisien dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Jika ROE semakin besar maka keuntungan yang didapat juga semakin besar sehingga memiliki rasio ROE yang cenderung berpengaruh positif. Artinya rata-rata rasio ROE berada dalam kategori sangat sehat dibandingkan rata-rata industri berada dalam kategori kurang sehat.

13. PT Bank Net Indonesia Syariah

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Dari tahun 2016-2018 rasio ROE berada dalam kondisi yang tidak sehat, rasio ROE berada dibawah standart yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar -11.28% pada tahun 2018. Karena bank mampu mengatasi pengaruh yang negatif pada bank ini maka pada tahun 2020 rasio ROE meningkat sebesar 19.67%. Dari data yang sudah ada pada bank ini rata-rata rasio ROE sebesar -1.45% berada dibawah rata-rata industri sebesar 4.17%, artinya rasio ROE yang cenderung berpengaruh negatif.

14. PT Bank NTB Syariah

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Dilihat pada bank ini bahwa rasio ROE pada tahun 2016-2017 belum ada, karena pada tahun ini bank tersebut belum beroperasi. Rasio ROE terkecil

terdapat pada tahun 2018 yaitu sebesar 8.92% dan rasio terbesar sebesar 12.05% pada tahun 2019. Dari data yang sudah ada pada bank ini rata-rata rasio ROE sebesar 10.08% berada dibawah rata-rata industri yaitu sebesar 4.17% yang artinya rata-rata rasio ROE berada dalam kategori cukup sehat dibandingkan rata-rata industri berada dalam kategori kurang sehat.

c. Beban Operasional pada Pendapatan Operasional BOPO

Efisiensi operasional merupakan upaya untuk mengetahui apakah bank dalam pengoperasionalnya dilakukan dengan benar, sesuai dengan tujuan pendiri dan pemegang saham. Menurut Bank Indonesia BOPO distandarisasikan untuk tidak melebihi angka 90%. Efisiensi berpengaruh terhadap kinerja bank karena dapat menunjukkan apakah bank tersebut dapat menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat. Bila rasio BOPO diatas standar yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia maka bank terdapat efisien.

Tabel 5.20

Perhitungan rasio BOPO

Nama bank	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
PT Bank Syariah Mandiri	94,12	94,44	90,68	83,26	81,26	88,75
PT Bank Syariah Muamalat Indonesia	97,76	97,68	98,24	98,83	98,83	98,27
PT Bank Syariah Mega Indonesia	88,16	89,16	93,78	94,91	92,81	91,76
PT Bank Syariah BNI	87,67	87,62	85,37	81,26	82,88	84,96
PT Bank Syariah BRI	91,33	95,24	95,32	96,75	89,93	93,71
PT Bank Syariah Bukopin	109,62	99,20	99,45	99,96	99,08	101,46

Nama bank	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
PT Bank Jabar dan Banten	122,77	134,63	94,66	95,97	95,22	108,65
PT Bank Panin Syariah	96,17	217,40	99,57	98,65	99,85	122,33
PT Bank Victoria Syariah	131,34	96,02	96,38	0,16	99,78	84,74
PT BCA Syariah	89,18	87,20	87,43	89,20	89,53	88,51
PT Bank Aceh	94,43	78,00	79,09	76,95	82,67	82,23
PT Bank BTPN Syariah TBK	75,14	68,81	62,36	58,07	54,85	63,85
PT Bank Net Indonesia Syariah	160,28	83,36	149,97	84,70	142,04	124,07
PT Bank NTB Syariah			86,86	76,83	80,04	81,24
Rata-rata Industri						93,89

Sumber : Data Olah 2021

Berdasarkan perhitungan BOPO yang dilakukan pada masing-masing Bank Syariah mendapatkan hasil sebagai berikut :

1. PT Bank Syariah Mandiri

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Rasio BOPO terbesar mencapai 94.44% pada tahun 2017 dan rasio BOPO terkecil mencapai 81.26% pada tahun 2020. Pada tahun 2020 rasio BOPO berada dalam kategori sangat sehat. Dari data yang sudah ada pada bank ini rata-rata rasio BOPO sebesar 88.78% berada diatas rata-rata industri yaitu sebesar 93.89%, yang artinya rata-rata rasio BOPO dalam kategori kurang sehat dibandingkan rata-rata industri dalam kategori tidak sehat.

2. PT Bank Syariah Muamalat Indonesia

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari rasio BOPO yang sebesar 97.76% pada tahun 2016 meningkat hingga mencapai 98.83% pada tahun 2020. Rasio BOPO ini berada di atas standar yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu 83%-89%. Dari data yang sudah ada pada bank ini rata-rata rasio BOPO dari 2016-2020 sebesar 98.27% berada di atas rata-rata industri yaitu sebesar 93.89%, yang artinya rata-rata rasio BOPO dan rata-rata industri sama-sama dalam kategori tidak sehat.

3. PT Bank Syariah Mega Indonesia

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Dari tahun 2016-2019 meningkat hingga mencapai 94.91% dan menurun ditahun 2020 sebesar 92.81%. Tetapi dari tahun 2017-2020 kondisi rasio BOPO dalam kategori tidak sehat. Dari data yang sudah ada pada PT Bank Syariah Mega Indonesia bahwa rata-rata rasio BOPO sebesar 91.76% berada di bawah rata-rata industri yaitu sebesar 93.89% yang artinya rata-rata rasio BOPO lebih sehat dibandingkan rata-rata industri.

4. PT Bank Syariah BNI

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Dari tahun 2016-2019 rasio BOPO menurun hingga mencapai 81.26% dan pada tahun 2020 rasio BOPO meningkat tidak terlalu tinggi yaitu sebesar 82.88%. Dari data yang sudah ada pada bank ini bahwa rata-rata rasio BOPO sebesar 84.96% berada di bawah rata-rata industri yaitu sebesar

93.89%, yang artinya rata-rata rasio BOPO dalam kategori sehat dibandingkan rata-rata industri yang dalam kategori tidak sehat.

5. PT Bank Syariah BRI

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Rasio BOPO terbesar yaitu sebesar 96.75% pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 menjadi rasio terkecil yaitu sebesar 89.93%. Dari data yang sudah ada pada PT Bank Syariah BRI memiliki rata-rata rasio BOPO sebesar 93.71% berada dibawah rata-rata industri sebesar 93.89%, yang artinya rata-rata rasio BOPO dan rata-rata industri sama-sama dalam kategori tidak sehat.

6. PT Bank Syariah Bukopin

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami penurunan rasio BOPO. Pada tahun 2016 rasio BOPO terbesar hingga mencapai 109.62%, hingga ditahun 2020 terjadi rasio BOPO yang terkecil mencapai 99.08%. Dari data yang sudah ada pada PT Bank Syariah Bukopin memiliki rata-rata rasio sebesar 101.46% berada diatas rata-rata industri yaitu sebesar 93.89%, yang artinya bank terdapat efisien.

7. PT Bank Jabar dan Banten

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Rasio BOPO terbesar mencapai 134.63% pada tahun 2017 dan rasio BOPO terkecil sebesar 94.66% pada tahun 2018. Dari data yang sudah ada pada PT Bank Jabar dan Banten memiliki rata-rata rasio BOPO sebesar 108.65% berada diatas rata-rata industri yaitu sebesar 93.89% yang artinya

jika bank melebihi angka 90% maka bank terdapat efisien. Dari tahun 2016-2020 rasio BOPO berada diatas standar yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu diatas 90%.

8. PT Bank Panin Syariah

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Rasio BOPO terbesar mencapai 217.40% pada tahun 2017 dan rasio BOPO terkecil sebesar 96.17% pada tahun 2016. Dari data yang sudah ada pada PT Bank Panin Syariah memiliki rata-rata rasio BOPO besar 122.33% berada diatas rata-rata industri sebesar 93.89% yang artinya rasio BOPO melebihi angka standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 90% maka bank terdapat efisien.

9. PT Bank Victoria Syariah

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Pada tahun 2016 mengalami rasio BOPO yang terbesar hingga mencapai 131.34% dan rasio terkecil sebesar 96.02% pada tahun 2017. Dari data yang sudah ada pada PT Bank Victoria Syariah memiliki rata-rata rasio BOPO besar 84.74% berada dibawah rata-rata industri yaitu sebesar 93.89% yang artinya rata-rata rasio BOPO dalam kategori sehat dibandingkan rata-rata industri dalam kategori tidak sehat.

10. PT BCA Syariah

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Pada tahun 2017 rasio BOPO menurun hingga mencapai 87.20% dan pada tahun 2020 meningkat hingga mencapai 89.53%. Dari data yang sudah ada

pada PT BCA Syariah memiliki rata-rata rasio BOPO sebesar 88.51% berada dibawah rata-rata industri sebesar 93.89% yang artinya rata-rata rasio BOPO dalam kategori lebih sehat dibandingkan rata-rata industri.

11. PT Bank Aceh

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Pada rasio BOPO terkecil sebesar 76.95% pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 meningkat sebesar 82.67%. Pada PT Bank Aceh dari tahun 2017-2020 rasio BOPO berada dibawah standar yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu dibawah 83%. Dari data yang sudah ada pada PT Bank Aceh memiliki rata-rata rasio BOPO sebesar 82.83% berada dibawah rata-rata industri yaitu sebesar 93.89% yang artinya rata-rata rasio BOPO dalam kategori sangat sehat dibandingkan rata-rata industri dalam kategori tidak sehat.

12. PT Bank BTPN Syariah TBK

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami penurunan persentase setiap tahunnya. Pada tahun 2016 rasio BOPO terbesar mencapai 75.14% dan setiap tahunnya selalu menurun hingga mencapai 54.85% pada tahun 2020, sehingga rasio BOPO dari tahun 2016-2020 berada dibawah standar yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu dibawah 83%. Dari data yang sudah ada pada PT Bank BTPN Syariah TBK memiliki rata-rata rasio BOPO sebesar 63.85% berada dibawah rata-rata industri yaitu sebesar 93.89%, yang artinya rata-rata rasio BOPO dalam kategori sangat sehat dibandingkan rata-rata industri dalam kondisis tidak sehat.

13. PT Bank Net Indonesia Syariah

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Rasio BOPO terbesar mencapai 199.97% pada tahun 2018, pada rata-rata rasio BOPO terlihat bahwa berada diatas standar yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu dari 83%-89%. Dari data yang sudah ada pada PT Bank Net Indonesia Syariah bahwa rata-rata rasio BOPO sebesar 124.07% berada diatas rata-rata industri yaitu sebesar 93.89%, yang artinya rata-rata rasio BOPO dan rata-rata industri sama-sama dalam kategori tidak sehat.

14. PT Bank NTB Syariah

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Dilihat pada tahun 2016-2017 bahwa PT Bank NTB Syariah belum beroperasi sehingga tidak memiliki laporan keuangan. Rasio BOPO terbesar mencapai 86.86% pada tahun 2018 sehingga pada tahun berikutnya menurun sebesar 80.04% pada tahun 2020. Dari data yang sudah ada pada PT Bank NTB Syariah memiliki rata-rata rasio BOPO sebesar 81.89% berada dibawah rata-rata industri yaitu sebesar 93.89%, artinya rata-rata rasio BOPO dalam kondisi sangat sehat dibandingkan rata-rata industri yang dalam kondisi tidak sehat.

5.1.4 Penilaian Capital

Penilaian dari faktor capital adalah dengan rasio CAR, dari hasil rasio CAR dapat dilihat sebagai berikut:

a.Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio merupakan suatu perbandingan jumlah modal bank dengan jumlah ATMR (aktiva tertimbang menurut rasio). CAR digunakan untuk dapat mengatur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko misalnya pembiayaan. Bila rasio CAR diatas standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia maka akan memiliki tingkat kecukupan modal yang sangat baik atas pemenuhan kewajiban yang telah dimiliki.

Bila rasio CAR dibawah standar minimum yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia maka dikatakan modal yang digunakan pada perusahaan belum mencukupi setiap kegiatan yang ada disuatu perusahaan secara efisien.

Tabel 5.21

Perhitungan Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR)

Nama bank	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
PT Bank Syariah Mandiri	14,01	15,89	16,26	16,08	17,41	15,93
PT Bank Syariah Muamalat Indonesia	12,74	13,62	12,34	12,42	12,48	12,72
PT Bank Syariah Mega Indonesia	23,53	22,91	21,38	20,45	19,28	21,51
PT Bank Syariah BNI	14,92	20,14	19,31	18,88	20,66	18,78
PT Bank Syariah BRI	20,62	20,29	29,72	26,55	23,73	24,18
PT Bank Syariah Bukopin	15,15	19,20	19,31	16,23	14,67	16,91
PT Bank Jabar dan Banten	18,25	16,25	16,43	15,19	16,04	16,43
PT Bank Panin Syariah	18,17	11,15	23,15	15,17	16,28	16,78

Nama bank	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
PT Bank Victoria Syariah	15,98	19,29	20,07	18,08	21,78	19,04
PT BCA Syariah	36,78	29,39	24,27	43,78	38,45	34,53
PT Bank Aceh	20,74	21,50	19,67	18,90	20,24	20,21
PT Bank BTPN Syariah TBK	23,80	28,91	40,92	44,57	42,44	36,13
PT Bank Net Indonesia Syariah	56,06	75,83	163,07	241,84	346,43	176,65
PT Bank NTB Syariah			35,42	35,47	32,65	34,51
Rata-rata Industri						33,17

Sumber : Data Olah 2021

Berdasarkan perhitungan CAR yang telah dilakukan pada masing-masing Bank Syariah mendapatkan hasil sebagai berikut :

1. PT Bank Syariah Mandiri

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami peningkatan persentase disetiap tahunnya. Rasio CAR terkecil sebesar 14.00% pada tahun 2016 dan meningkat sehingga mencapai 17.41% pada tahun 2020. Dari data yang sudah ada pada PT Bank Syariah Mandiri memiliki rata-rata rasio CAR sebesar 15.93% berada dibawah rata-rata industri yaitu sebesar 33.17% artinya modal yang digunakan belum suatu perusahaan belum mencukupi setiap kegiatan yang ada diperusahaan tersebut. CAR yang dikenal dengan kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva dikatakan sangat sehat karena berada diatas standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, karena semakin besar rasio

CAR yang dihasilkan maka Kinerja Keuangan Bank juga akan semakin baik.

2. PT Bank Syariah Muamalat Indonesia

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Rasio CAR terkecil terdapat pada tahun 2018 sebesar 12.34% dan rasio terbesar pada tahun 2017 sebesar 13.62% karena pemegang saham memiliki komitmen jangka panjang terhadap bank ini sehingga bank memiliki tambahan modal. Dari data yang sudah ada pada PT Bank Syariah Muamalat Indonesia memiliki rata-rata rasio CAR sebesar 12.72% berada dibawah rata-rata industri yaitu sebesar 33.17% artinya modal yang dimiliki perusahaan belum mencukupi secara efisien atau ada kerugian yang tidak dapat dihindari dilihat dari rata-rata industri sejak tahun 2016-2020. Jika semakin besar rasio CAR yang dihasilkan maka kinerja keuangan bank yang dihasilkan juga akan semakin baik, sehingga pada bank ini memiliki tingkat kecukupan modal yang sangat baik atas pemenuhan kewajiban yang dimiliki, baik dalam mendanai kegiatan operasionalnya maupun untuk menghadapi risiko aktiva.

3. PT Bank Syariah Mega Indonesia

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami penurunan persentase. Pada tahun 2016 memiliki rasio CAR terbesar hingga m,encapai 23.53% dan ditahun berikutnya menurun sebesar 19.28% pada tahun 2020. Dari data yang sudah ada pada PT Bank Syariah Mega Indonesia memiliki rata-rata rasio CAR sebesar 21.51% berada dibawah rata-rata industri yaitu

sebesar 33.17% artinya modal yang dimiliki perusahaan belum mencukupi secara efisien atau ada kerugian yang tidak dapat dihindari dilihat dari rata-rata industri sejak tahun 2016-2020. Jika semakin besar rasio CAR yang dihasilkan maka kinerja keuangan bank yang dihasilkan juga akan semakin baik, sehingga pada bank ini memiliki tingkat kecukupan modal yang sangat baik atas pemenuhan kewajiban yang dimiliki, baik dalam mendanai kegiatan operasionalnya maupun untuk menghadapi risiko aktiva.

4. PT Bank Syariah BNI

Pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Rasio CAR terbesar terjadi pada tahun 2020 sebesar 20.66% dan rasio CAR terkecil pada tahun 2016 sebesar 14.92%. Dari data yang sudah ada pada PT Bank Syariah BNI memiliki rata-rata rasio CAR sebesar 18.78% berada dibawah rata-rata industri yaitu sebesar 33.17% artinya modal yang dimiliki perusahaan belum mencukupi secara efisien atau ada kerugian yang tidak dapat dihindari dilihat dari rata-rata industri sejak tahun 2016-2020. Jika semakin besar rasio CAR yang dihasilkan maka kinerja keuangan bank yang dihasilkan juga akan semakin baik, sehingga pada bank ini memiliki tingkat kecukupan modal yang sangat baik atas pemenuhan kewajiban yang dimiliki, baik dalam mendanai kegiatan operasionalnya maupun untuk menghadapi risiko aktiva.

5. PT Bank Syariah BRI

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Rasio CAR terbesar terjadi pada tahun 2018 sebesar 29.72% dan rasio CAR terkecil sebesar 20.29% pada tahun 2017. Dari data yang sudah ada pada PT Bank Syariah BRI memiliki rata-rata rasio CAR sebesar 24.18% berada dibawah rata-rata industri yaitu sebesar 33.17% artinya modal yang dimiliki perusahaan belum mencukupi secara efisien atau ada kerugian yang tidak dapat dihindari dilihat dari rata-rata industri sejak tahun 2016-2020. Jika semakin besar rasio CAR yang dihasilkan maka kinerja keuangan bank yang dihasilkan juga akan semakin baik, sehingga pada bank ini memiliki tingkat kecukupan modal yang sangat baik atas pemenuhan kewajiban yang dimiliki, baik dalam mendanai kegiatan operasionalnya maupun untuk menghadapi risiko aktiva.

6. PT Bank Syariah Bukopin

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2017 rasio CAR meningkat sebesar 19.20% dan pada tahun 2020 rasio CAR menurun menjadi 14.67%. Dari data yang sudah ada pada PT Bank Syariah memiliki rata-rata rasio CAR sebesar 16.91% berada dibawah rata-rata industri yaitu sebesar 33.17% artinya modal yang dimiliki perusahaan belum mencukupi secara efisien atau ada kerugian yang tidak dapat dihindari dilihat dari rata-rata industri sejak tahun 2016-2020. Jika semakin besar rasio CAR yang dihasilkan maka kinerja keuangan bank yang dihasilkan juga akan semakin baik, sehingga pada bank ini memiliki tingkat kecukupan modal yang sangat baik atas

pemenuhan kewajiban yang dimiliki, baik dalam mendanai kegiatan operasionalnya maupun untuk menghadapi risiko aktiva.

7. PT Bank Jabar dan Banten

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Rasio CAR terbesar 18.25% terdapat pada tahun 2016 dan rasio terkecil pada tahun 2019 sebesar 15.19%. Dari data yang sudah ada pada PT Bank Jabar dan Banten memiliki rata-rata rasio CAR sebesar 16.43% berada dibawah rata-rata industri yaitu sebesar 33.17% artinya modal yang digunakan perusahaan belum mencukupi setiap kegiatan yang ada diperusahaan tersebut secara efisien. Jika semakin besar rasio CAR yang dihasilkan maka kinerja keuangan bank yang dihasilkan juga akan semakin baik, sehingga pada bank ini memiliki tingkat kecukupan modal yang sangat baik atas pemenuhan kewajiban yang dimiliki, baik dalam mendanai kegiatan operasionalnya maupun untuk menghadapi risiko aktiva.

8. PT Bank Panin Syariah

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Rasio CAR terbesar terdapat pada tahun 2018 sebesar 23.15% karena bank mampu bersaing di industri perbankan syariah maka dilihat dari sisi permodalan PT Bank Panin Syariah sudah kuat. Dari data yang sudah ada pada PT Bank Panin Syariah memiliki rata-rata rasio CAR sebesar 16.78% berada diatas rata-rata industri yaitu sebesar 33.17% artinya modal yang digunakan perusahaan belum mencukupi setiap kegiatan yang ada

diperusahaan tersebut secara efisien. Jika semakin besar rasio CAR yang dihasilkan maka kinerja keuangan bank yang dihasilkan juga akan semakin baik, sehingga pada bank ini memiliki tingkat kecukupan modal yang sangat baik atas pemenuhan kewajiban yang dimiliki, baik dalam mendanai kegiatan operasionalnya maupun untuk menghadapi risiko aktiva.

9. PT Bank Victoria Syariah

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Rasio CAR terkecil terdapat pada tahun 2016 sebesar 15.98% dan pada tahun 2020 rasio CAR meningkat sehingga mencapai 21.78%. Dari data yang sudah ada pada PT Bank Victoria Syariah memiliki rata-rata rasio CAR sebesar 19.04% berada dibawah rata-rata industri yaitu sebesar 33.17% artinya modal yang digunakan perusahaan belum mencukupi setiap kegiatan yang ada diperusahaan tersebut secara efisien. Jika semakin besar rasio CAR yang dihasilkan maka kinerja keuangan bank yang dihasilkan juga akan semakin baik, sehingga pada bank ini memiliki tingkat kecukupan modal yang sangat baik atas pemenuhan kewajiban yang dimiliki, baik dalam mendanai kegiatan operasionalnya maupun untuk menghadapi risiko aktiva.

10. PT BCA Syariah

Dari periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Rasio CAR terkecil pada tahun 2017 sebesar 29.39% karena total ekuitas meningkat pada tahun ini sehingga modal yang dimiliki juga meningkat

pada tahun sebelumnya dan rasio CAR terbesar terdapat pada tahun 2019 sebesar 43.78% mampu mempertahankan diatas standar yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu diatas 12%. Dari data yang sudah ada pada PT BCA Syariah memiliki rata-rata rasio CAR sebesar 34.53% berada diatas rata-rata industri yaitu sebesar 33.17% artinya modal yang digunakan sudah mencapai efisien dan tidak ada kerugian yang tidak dapat dihindari dilihat dari rata-rata industri dari tahun 2016-2020 sehingga sumber pendanaan bank yang akan digunakan secara langsung untum pembelian aset penghasil laba sudah maksimal. Jika semakin besar rasio CAR yang dihasilkan maka kinerja keuangan bank yang dihasilkan juga akan semakin baik, sehingga pada bank ini memiliki tingkat kecukupan modal yang sangat baik atas pemenuhan kewajiban yang dimiliki, baik dalam mendanai kegiatan operasionalnya maupun untuk menghadapi risiko aktiva.

11. PT Bank Aceh

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Rasio CAR terkecil terdapat pada tahun 2019 sebesar 18.90% dan rasio CAR terbesar pada tahun 2017 sebesar 21.50%. Dari data yang sudah ada pada PT Bank Aceh memiliki rata-rata rasio CAR sebesar 20.21% berada dibawah rata-rata industri yaitu sebesar 33.17% artinya modal yang digunakan perusahaan belum mencukupi setiap kegiatan yang ada diperusahaan tersebut secara efisien. Jika semakin besar rasio CAR yang dihasilkan maka kinerja keuangan bank yang dihasilkan juga akan

semakin baik, sehingga pada bank ini memiliki tingkat kecukupan modal yang sangat baik atas pemenuhan kewajiban yang dimiliki, baik dalam mendanai kegiatan operasionalnya maupun untuk menghadapi risiko aktiva.

12. PT Bank BTPN Syariah TBK

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami peningkatan persentase. Dari tahun 2016-2019 rasio CAR meningkat sehingga mencapai 44.57% dan pada tahun 2020 rasio CAR menurun sebesar 42.44%, tetapi dari tahun 2016-2020 rasio CAR masih berada di atas maksimal yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 12%. Dari data yang sudah ada pada PT Bank BTPN Syariah TBK memiliki rata-rata rasio CAR sebesar 36.13% berada di atas rata-rata industri yaitu sebesar 33.17% artinya modal yang digunakan sudah mencapai efisien dan tidak ada kerugian yang tidak dapat dihindari dilihat dari rata-rata industri dari tahun 2016-2020 sehingga sumber pendanaan bank yang akan digunakan secara langsung untuk pembelian aset penghasil laba sudah maksimal. Jika semakin besar rasio CAR yang dihasilkan maka kinerja keuangan bank yang dihasilkan juga akan semakin baik, sehingga pada bank ini memiliki tingkat kecukupan modal yang sangat baik atas pemenuhan kewajiban yang dimiliki, baik dalam mendanai kegiatan operasionalnya maupun untuk menghadapi risiko aktiva.

13. PT Bank Net Indonesia Syariah

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi persentase. Rasio CAR terkecil terdapat pada tahun 2019 sebesar 24.84% karena total ekuitas meningkat pada tahun ini sehingga rasio CAR terbesar terdapat pada tahun 2020 sebesar 346.43%. Dari data yang sudah ada pada PT Bank Net Indonesia Syariah memiliki rata-rata rasio CAR sebesar 176.65% berada di atas rata-rata industri yaitu sebesar 33.17% artinya modal yang digunakan sudah mencapai efisien dan tidak ada kerugian yang tidak dapat dihindari dilihat dari rata-rata industri dari tahun 2016-2020 sehingga sumber pendanaan bank yang akan digunakan secara langsung untuk pembelian aset penghasil laba sudah maksimal. Jika semakin besar rasio CAR yang dihasilkan maka kinerja keuangan bank yang dihasilkan juga akan semakin baik, sehingga pada bank ini memiliki tingkat kecukupan modal yang sangat baik atas pemenuhan kewajiban yang dimiliki, baik dalam mendanai kegiatan operasionalnya maupun untuk menghadapi risiko aktiva.

14. PT Bank NTB Syariah

Pada periode tahun 2016-2020 mengalami penurunan persentase. Pada tahun 2016-2017 bank ini belum beroperasi, maka pada tahun 2018 terdapat rasio CAR terbesar sebesar 35.42% dan pada tahun 2020 rasio CAR menurun hingga mencapai 32.65% tetapi rasio CAR dari tahun 2018-2020 masih berada di atas maksimal yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 12%. Dari data yang sudah ada pada PT Bank NTB Syariah memiliki rata-rata rasio CAR sebesar 34.51% berada di atas

rata-rata industri yaitu sebesar 33.17% artinya modal yang digunakan sudah mencapai efisien dan tidak ada kerugian yang tidak dapat dihindari dilihat dari rata-rata industri dari tahun 2016-2020 sehingga sumber pendanaan bank yang akan digunakan secara langsung untuk pembelian aset penghasil laba sudah maksimal. Jika semakin besar rasio CAR yang dihasilkan maka kinerja keuangan bank yang dihasilkan juga akan semakin baik, sehingga pada bank ini memiliki tingkat kecukupan modal yang sangat baik atas pemenuhan kewajiban yang dimiliki, baik dalam mendanai kegiatan operasionalnya maupun untuk menghadapi risiko aktiva.

5.2 Pembahasan

Dari hasil pengujian yang dilakukan diketahui bahwa hipotesis yang diajukan diterima setelah dilakukan perhitungan rasio kinerja keuangan pada 14 bank syariah yang ada di Indonesia dengan menggunakan metode RGEC dalam kategori sehat. Berdasarkan dari analisis kinerja keuangan pada 14 bank syariah yang ada di Indonesia dengan melihat rata-rata industri dilihat dari penilaian profile risk yaitu NPF dan FDR secara keseluruhan bahwa kondisi bank secara umum dengan kategori "Sehat" karena berada dalam peringkat 2 untuk NPF, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan pada kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya yang tercermin dari faktor penilaian pada NPF.

Sedangkan faktor FDR secara keseluruhan mencerminkan bahwa kondisi bank secara umum dengan kategori "Tidak Sehat" karena berada dalam peringkat 5,

sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya terlihat pada faktor penilaian FDR. Bila dilihat dari rata-rata industri rasio FDR berada dibawah standar yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia artinya belum mampu menyalurkan dana kepada pihak ketiga yang membutuhkan biaya sehingga bank tidak mampu menjalankan fungsinya. Karena secara umum bila rasio FDR berada pada standar yang telah ditetapkan maka akan mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan analisis kinerja keuangan pada 14 bank syariah yang ada di Indonesia dengan melihat rata-rata peringkat dari faktor GCG secara keseluruhan terlihat bahwa kondisi bank secara umum dalam kategori “Sehat” karena berada pada peringkat 2, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya dilihat dari faktor penilaian GCG.

Berdasarkan analisis kinerja keuangan pada 14 bank syariah yang ada di Indonesia dengan melihat rata-rata industri dilihat dari faktor ROA secara keseluruhan terlihat bahwa kondisi bank secara umum dalam kategori “Sehat” karena berada pada peringkat 2, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya dilihat dari faktor penilaian ROA. Bila dilihat dari rata-rata industri dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan selama periode.

Berdasarkan kinerja keuangan pada 14 bank syariah yang ada di Indonesia dengan melihat rata-rata industri dilihat dari faktor ROE secara keseluruhan

terlihat bahwa kondisi bank secara umum dalam kategori “Kurang Sehat” karena berada pada peringkat 4, sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya dilihat dari faktor penilaian ROE. Bila dilihat dari rata-rata industri ROE secara umum bank kurang efisien dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan selama periode yang telah ditentukan.

Sedangkan jika dilihat dari analisis kinerja keuangan pada 14 bank syariah yang ada di Indonesia dengan melihat rata-rata industri dilihat dari faktor BOPO secara keseluruhan terlihat bahwa kondisi bank secara umum dalam kategori “Tidak Sehat” karena berada pada peringkat 5, sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya dilihat dari faktor penilaian BOPO. Bila dilihat dari rata-rata industri BOPO secara umum bank kurang efisien dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan selama periode yang telah ditentukan.

Berdasarkan analisis kinerja keuangan pada 14 bank syariah yang ada di Indonesia dengan melihat rata-rata industri dari faktor CAR secara keseluruhan dilihat kondisi bank dalam kategori “Sangat Sehat” karena berada pada peringkat 1, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya dilihat dari faktor penilaian CAR. Bila dilihat dari rata-rata industri rasio CAR masih berada di atas standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang artinya memiliki tingkat kecukupan modal yang sangat baik atas pemenuhan kewajiban yang telah

dimiliki, baik dalam mendanai kegiatan operasionalnya maupun untuk menghadapi risiko aktiva.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Non Performing Financing (NPF), Good Corporate Governace (GCG) dan Retrun on Asset (ROA) untuk 14 Bank Syariah yang berada di Iindonesia pada tahun 2016-2020 dalam kategori “sehat”
2. Financing to Deposit Ratio (FDR), Return on Equity (ROE) dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) untuk 14 Bank Syariah yang berada di Indonesia pada tahun 2016-2020 dalam kategori “Kurang sehat” karena hal ini menunjukkan pada tingkat kemampuan bank dalam membayarkan kembali penarikan dana yang dilakukan oleh pihak ketiga meskipun jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan semakin besar.
3. Capital Adequasy Ratio (CAR) untuk 14 bank syariah yang berada di Indonesia pada tahun 2016-2020 dalam kategori “sangat sehat” karena hal ini menunjukkan bahwa CAR mampu mengelola permodalan dengan sangat baik sesuai karakteristik. Setiap bank memiliki tingkat kecukupan modal yang sangat baik atas pemenuhan kewajiban yang dimilikinya yang dapat mengatasi kemungkinan terjadinya risiko.

6.2 Saran

Setelah melakukan analisis dan penelitian, penulis dapat memberikan saran kepada perusahaan dan penelitian yang akan datang, antara lain:

1. Kinerja keuangan suatu bank dapat menarik stakeholder untuk memberikan kepercayaan dalam menanamkan dana ke suatu bank tersebut. Sehingga bank disarankan memperkuat kegiatan usaha agar jumlah aset yang dimiliki semakin meningkat, dan jumlah penyaluran dana baik dalam bentuk pembiayaan maupun penempatan di bank lain semakin meningkat, serta pendapatan operasional dan laba yang diperoleh untuk tahun berikutnya semakin meningkat sehingga dapat bersaing dengan bank lain.
2. Berdasarkan rasio-rasio yang digunakan untuk pengukuran Bank Syariah yang ada di Indonesia terdapat beberapa bank pada periode yang mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan yang tajam. Dengan hal ini dapat dilakukan pengawasan yang lebih ketat agar pada rasio-rasio tersebut terus mengalami peningkatan yang baik untuk tahun-tahun berikutnya. Sehingga rasio-rasio yang diperlukan harus mencapai target minimum dalam kategori cukup sehat.
3. Untuk rasio NPF yang kurang sehat harus dapat mengelola pembiayaan yang lebih efektif lagi dan bank-bank yang CAR nya dalam kategori tidak sehat akan meningkatkan kerugian dalam perusahaan sehingga harus mengembalikan level CAR yang sesuai dengan ketentuan OJK yang minimum kondisi CAR cukup sehat.

4. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan objek penelitian pada bank konvensional agar dapat dibandingkan dengan bank syariah yang berada di Indonesia. Sehingga kasus-kasus yang ada pada suatu bank dapat dipelajari dan menjadi inspirasi bagi bank lain. Agar penelitian yang dilakukan menjadi lebih luas serta memberikan informasi yang bermanfaat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia.1992.UU No. 7 tahun 1992, tentang Perbankan. Jakarta.

Bank Jabar dan Banten, profil perusahaan, diakses pada tanggal 29 Juni 2021 dari <http://www.bankbjb.co.id>

Bank Panin Syariah, profil perusahaan, diakses pada tanggal 30 Juni 2021 dari <https://www.paninbanksyariah.co.id>

Bank Rakyat Indonesia Syariah, profil perusahaan, diakses pada tanggal 29 Juni 2021 dari <http://www.brisyariah.co.id>

Bank Syariah Bukopin, profil perusahaan, diakses pada tanggal 29 Juni 2021 dari <http://www.syariahbukopin.co.id>

Bank Syariah Mandiri, profil dan produk bank mandiri syariah, diakses pada tanggal 28 Juni 2021 dari <http://www.syariahbank.co.id>

Bank Victoria Syariah, profil perusahaan, diakses pada tanggal 11 Juli 2021 dari <https://bankvictoriasyariah.co.id>

BCA Syariah, profil perusahaan, diakses pada tanggal 11 Juli 2021 melalui <https://www.bcasyariah.co.id>

Bank Aceh, profil perusahaan, diakses pada tanggal 11 Juli 2021 melalui situs <https://www.bankaceh.co.id>

Bank BTPN Syariah Tbk, profil perusahaan, diakses pada tanggal 11 Juni 2021 melalui situs <https://www.btpn.com>

Bank Net Indonesia Syariah, profil perusahaan, diakses pada 11 Juli 2021 melalui situs <https://idnfinancials.com>

Bank NTB Syariah, profil perusahaan, diakses pada 11 Juli 2021 melalui situs <https://www.bankntbsyariah.co.id>

Budianto. 2020. Jurnal Ekonomi Manajemen. Analisis Tingkat Kesehatan PT Bank Aceh Syariah dengan menggunakan RGEC. Vol 3.

Budisantoso, T dan Sigit. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Edisi 2. Jakarta: Selemba Empat.

Harjito dan Martono.2012.Manajemen Keuangan:Edisi Kedua. Yogyakarta: Ekonisia.

<http://www.kajianpustaka.com/2013/01/pengertian-dan-fungsi-perbankan.html>.

Kasmir . 2016. Analisis Laporan Keuangan: cetakan kesembilan. Jakarta: Rajawali.

Kasmir. 2002. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, edisi keempat, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Riandi Chandra, Maryam Mangantar, dan Sem G Oroh.2016. Analisis Kinerja Keuangan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Mandiri tbk Dengan Menggunakan Metode CAMEL. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol 16(2).

Sumarta Nurmadi. 2016. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Berdasarkan Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital (RGEC) pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Periode 2011-2014. ISSN0215-3092.

Sumarti. 2007. "Analisis Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah Mandiri Di Jakarta". Skripsi. Ekonomi, Manajemen, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

www.ojk.go.id